TANHANA DHARMMA MANGRVA

jurnal kajian
LEMHANNAS RI

Edisi 42 | Juni 2020

Pilkada Serentak 2020 di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif Berbasis Multikultur?

Dr. Djoharis Lubis, M.Sc.

Membumikan Pancasila Melalui Proses Indoktrinasi Terukur

Kolonel Tek Wajariman

Dampak Tumpang Tindih Peraturan dan Perundang-Undangan di Era Otonomi Daerah

Marsma Arif Widianto, S.A.B,M.Tr (Han)

Optimalisasi Peran Pemimpin Nasional Untuk Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan

Kolonel Pnb Fakhrizet, S.Sos.

Optimalisasi Pendidikan Nasional Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Kombes Pol Drs. Zarialdi, S.H., M.H.

Memperkuat Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Indonesia-Namibia Baru

Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin

SAMBUTAN REDAKSI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi ke-42 dapat terbit ke hadiran para pembaca sekalian.

Berbicara tentang ketahanan nasional pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, tetapi juga dapat dikaitkan dengan hubungan internasional.

Pada jurnal edisi kali ini, redaksi menyajikan berbagai tulisan isu-isu nasional dan internasional yang berasal dari Tenaga Profesional dan para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 60. Selain itu, terdapat tulisan dari praktisi dalam hubungan internasional.

Pilkada serentak 2020 menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibahas, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Kepemimpinan efektif berbasis multikutur.

Sementara isu dalam negeri yang juga menarik diulas adalah di bidang ideologi seperti proses indoktrinasi terukur dalam membumikan Pancasila, dan bidang pendidikan yang mengangkat optimalisasi pendidikan nasional.

Isu Kepemimpinan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia juga menjadi topik menarik untuk diangkat. Isu lainnya adalah tekait tumpang tindihnya peraturan dan perundangan yang masih terjadi di era otonomi daerah. Kemudian isu di bidang ekonomi yang mengaitkan hubungan internasional dalam hal ini Indonesia dengan Namibia Baru.

Kami menyampaikan apresiasi bagi para kontributor yang telah mengirimkan tulisannya kepada redaksi dan juga peserta PPRA 60 atas esai terbaiknya. Semoga buah pemikiran para kontributor memberi manfaat dan memperkaya wawasan tentang permasalahan ketahanan nasional yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini.

Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Juni 2020
PEMIMPIN REDAKSI

PELINDUNG Agus Widjojo **PEMBINA** Wieko Syofyan **PENGARAH** Didid Widjanardi
PENANGGUNG JAWAB Sugeng Santoso **REDAKTUR** Adri Koesdyanto
PENYUNTING/EDITOR Bambang Iman Aryanto **DESAIN GRAFIS** Arini Maulidia
SEKRETARIAT Irmina Sri Ekowati, Endah Heliana, Mardiana Prihatini, Gatot, Magista Dian Fitrilia, Maulida Arbaningsih, Yusnadi
Isi di luar tanggung jawab percetakan CV. Sempurna Jaya Indonesia

Daftar isi

jurnal kajian

Pilkada Serentak 2020 di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan yang Efektif Berbasis Multikultur?

Dr. Djoharis Lubis, M.Sc.

3

Membumikan Pancasila Melalui Proses Indoktrinasi Terukur

Kolonel Tek Wajariman

23

Dampak Tumpang Tindih Peraturan dan Perundang-Undangan di Era Otonomi Daerah

Marsma Arif Widianto, S.A.B,M. Tr (Han)

29

Optimalisasi Peran Pemimpin Nasional Untuk Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan

Kolonel Pnb Fakhrizet, S.Sos.

35

Optimalisasi Pendidikan Nasional Guna Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Kombes Pol Drs. Zarialdi, S.H., M.H.

43

Memperkuat Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Indonesia-Namibia Baru

Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin

49

PILKADA SERENTAK 2020 DI TENGAH GELOMBANG PANDEMI COVID-19: APAKAH MENGHASILKAN KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF BERBASIS MULTIKULTUR?

Dr. Djoharis Lubis, M.Sc.

Tenaga Profesional Lemhannas RI Bidang Studi Demografi dan Kepemimpinan

Alumni KSA XII tahun 2004

Abstraksi

Pilkada langsung secara serentak berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 baru akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mengingat Vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka diperkirakan Pilkada Serentak sebagai sarana rakyat berdemokrasi secara Luber, efisien dan disentralisasi berlangsung masih dalam gelombang Pandemi Covid-19. Mempertimbangkan Pandemi Covid-19 ini berdampak multidimensional dan mendorong masyarakat untuk hidup dengan "New Normal Life" dengan rambu-rambu Protokol Kesehatan disertai masing-masing daerah memiliki karakteristik yang beragam budaya, agama, adat istiadatnya dan masih terdapat konflik-konflik sosial, maka hasil Pilkada Serentak tahun 2020 diharapkan dapat menghasilkan Pemimpin dan kepemimpinan berbasis Multikultur yang mampu menangkal dan menyelesaikan konflik-konflik sosial dimaksud. Namun demikian, masih dirasakan bahwa demokrasi melalui Pilkada, kendati sudah bersifat langsung bahkan serentak, bukan hanya belum menjadi faktor signifikan perubahan budaya politik elite lokal, tetapi juga cenderung menghasilkan pemimpin yang kurang berintegritas karena hutang budi disaat proses pencalonannya serta memfasilitasi menguatnya kembali politik identitas berbasis sentimen primordial, baik atas nama suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Kedepan diharapkan setiap penyelenggara Pilkada Serentak dapat membangun sistem Pilkada yang memperhatikan keberagaman dan menghasilkan Pemimpin yang memiliki integritas diri berbasis multikultur.

Katakunci: pemimpin, multikultur, pilkada serentak,

Sumber: www.goodnewsfromindonesia.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara **kepulauan terbesar di dunia** terdiri dari 17.499 **pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke.** Menurut Data BPS hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, **jumlah penduduk Indonesia** akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020. Angka tersebut terdiri atas 135,34 juta jiwa laki-laki dan 134,27 jiwa perempuan. Sebanyak 66,07 juta jiwa masuk kategori usia belum produktif (0-4 tahun), kemudian sebanyak 185,34 juta jiwa merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan sebanyak 18,2 juta jiwa merupakan penduduk usia sudah tidak produktif (> 65 tahun). Saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia tidak produktif (usia belum produktif + usia sudah tidak produktif).[1]

Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tsb di atas, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Enam agama besar yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Khu Chu, 300 kelompok etnis, dan 1,200 bahasa. Dengan demikian, wajah negeri kita ini memperlihatkan khasanah kemajemukan. Wilayah wilayah di tanah air kita tidak lagi mengkalim diri sebgai wilayah yang hanya dihuni oleh satu kelompok saja, karena mobilitas penduduk telah merubah semua konsentrasi kewilayahan atau komunitas berdasarkan etnik, budaya dan agama. Di Bali yang disebut sebagai kantong agama Hindu, kini telah berdomisili agama dan budaya lain, di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua yang ditasbihkan kantong-kantong Nasrani juga telah berdomisili populasi Muslim dalam jumlah besar dan menjalankan liturgi teologi dan sikap budaya mereka dengan damai.

Di daerah Muslim Makassar, Sumatera Barat, Aceh dan Jawa Barat dengan kebudayaan Islam mereka yang konservatif, agama agama non muslim juga tetap hadir dan tumbuh. Para penganut berbagai agama itu bukan hanya sekedar hadir, mereka datang dan tumbuh membawa kebudayaan mereka sendiri ke wilayah

itu. Para Penganut berbagai agama dan pengusung kebudayaan yang berbeda itu bukan hanya sekedar hadir, tetapi juga mampu mengembangkan relasi harmonis di antara mereka, karena Konstitusi Negara kita telah mengamanatkan Keindonesiaan yang majemuk ini, ada rasa kebangsaan yang dibingkai oleh dasar Negara Pancasila yang memungkinkan umat dari berbagai agama dan etnik untuk hidup berdampingan secara damai, saling hormat menghormati dan menghargai satu sama lain. Kesadaran tentang kemajemukan tersebut harus terus menerus menjadi bagian integral dari degup jantung kehidupan kita sebagai bangsa. Namun sebagai bangsa, kita juga pernah mengalami dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai adanya konflik-konflik horizontal berbasis agama, suku, ras dan etnis seperti peristiwa di Ambon, Poso, Kalimantan Barat dan Konflik Vertikal seperti di Aceh maupun di Papua. Disinilah pentingnya Peranan Pemimpin Hasil Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi Pemimpin Daerah Berbasis Multikultur yang mampu mengayomi rakyatnya yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis, ras dan budaya lokal maupun kearifan lokal

Dalam Konteks Pilkada Serentak Tahun 2020 ini, Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 telah menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada tanggal 23 September untuk memilih 9 Gubernur, 224 Bupati, dan 37 Walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena Pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun akibat Pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.[2]

Dalam tulisan ini, penulis Tidak ingin membahas Penyelenggaraan Administratif Pilkada Tahun 2020, tetapi Penulis ingin mengemukakan suatu "Harapan Strategis" kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota terpilih setelah Pilkada Serentak 2020 ini akan lahir "Generasi Pemimpin yang akan menentukan 5 tahun masa depan Indonesia dalam pola kehidupan Normal yang baru". Meskipun hasil Pilkada Serentak bersifat Lokal, namun diharuskan oleh konstitusi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati berwawasan Nasional bahkan Global bersendikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Hal-hal yang dikemukakan diatas sudah merupakan rujukan sesuai konstitusi karena masyarakat kita masyarakat plural beraneka ragam Suku, Agama dan Ras merupakan realitas yang terberi (given). Keanekaragaman merupakan sebuah anugerah Tuhan, sebuah kekayaan, bukan bencana. Ia akan menjadi bencana jika tidak dikelola secara apik dengan dilandasi nilai-nilai etis dan agama. Ini membuat

keanekaragaman menjadi fungsional dan operasional, bukan sekadar perbedaan matematis dan tanpa roh. Fakta-fakta menunjukkan betapa beragamnya realitas kita saat ini, bahkan sesungguhnya hal itu sudah terjadi sejak dulu. Dengan demikian jika ada yang menolak keberagaman dimaksud berarti penolakan terhadap Tuhan Maha Pencipta Alam. Untuk itulah diperlukan kepemimpinan Pancasila berbasis Multikultural yang tidak bisa dan keluar dari substansi kepemimpinan yang berdiri pada prinsip keadilan dan kebenaran, serta perlu melihat basis etis dari kepemimpinan multikultural. Fakta juga menunjukkan sering kali terjadi benturan, bahkan konflik atas nama keragaman atau perbedaan (baik suku, agama, maupun yang lainnya).

Sebagai contoh, laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia menunjukkan bahwa selama tahun 2016 saja, terjadi 525 konflik sosial di seluruh Indonesia, yang mana 431 telah berhasil diselesaikan, dan 94 masih dimediasi di (Kementerian Dalam Negeri, 2017). Seperti disebutkan oleh Arbatl, Ashraf, Galor dan Klemp (2015), sejak ribuan tahun yang lalu, keberagaman populasi merupakan determinan dari konflik sipil. Dalam hal ini, Indonesia merupakan kandidat yang sempurna bagi konflik berbasis etnis dan agama. Sensus demografis yang terakhir menunjukkan bahwa negara ini memang sangat beragam dari segi budaya, agama, ras dan suku, yang mencakup sekitar 1340 suku, 300 kelompok etnis, 1,200 bahasa, dan enam agama resmi yang diakui (Na'im & Syaputra, 2011). Karena itu, penelitian tentang konflik di Indonesia masih dibutuhkan untuk membahas bagaimana melaksanakan resolusi konflik sosial di Indonesia, yang salah satunya adalah melalui kepemimpinan yang efektfif berbasis multikultur. Dalam hasil penelitian tentang konflik komunal skala besar yang terjadi di Kalimantan Barat, ditemukan bahwa kehancuran ikatan sosial yang terjadi, adalah akibat kepemimpinan lokal yang tidak efektif (Sukma, 2005). Erzen dan Armagan (2015) yang melakukan studi yang mendalam tentang kepemimpinan dalam konteks resolusi konflik, menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang besar pada manajemen konflik. Tidak hanya seorang pemimpin dapat memainkan peran yang konstruktif untuk menyakinkan pengikutnya agar menghindari atau menghentikan konflik, sebaliknya ia juga dapat menjadi inisiator dari konflik itu sendiri, Rich, and Democratic) seperti Indonesia (Henrich, Heine, & Norenzayan, 2010). Riset ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian: "Kriteria kepemimpinan apa yang efektif dalam memimpin masyarakat multikultural untuk mengatasi konflik etno religius.[3]

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut diatas, maka kesadaran tentang fakta perbedaan itu perlu disikapi dan dikelola oleh sebuah kepemimpinan berbasis Multikultur yang sanggup mensinergikan tiap keragaman yang ada. Ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Jalan panjang dan terjal akan dihadapi seorang pemimpin yang memilih menggunakan pola kepemimpinan berbasis multikultur agar dapat menjadi seorang pemimpin yang efektip sesuai dengan karakteristik dan kultural di wilayahnya.

PEMBAHASAN

Teori-teori tentang kepemimpinan yang dapat membuat seseorang menjadi pemimpin efektif telah diteliti sejak ratusan tahun lalu. Buku Ralph Stogdill yang berjudul Handbook of Leadership (1974), yang merupakan suatu bacaan klasik tentang kepemimpinan telah mengutip 3,000 referensi tentang studi kepemimpinan. Buku ini direvisi 25 tahun kemudian dan mengutip 7,500 referensi

untuk topik yang sama (Bass, 1990). Alasan mengapa begitu banyak penelitian tentang kepemimpinan adalah sangat jelas – kepemimpinan yang buruk adalah sumber utama dari kegagalan, mulai dari kekacauan dalam manajemen (Zimmerer & Yasin, 1998), sampai terjadinya negara gagal (Agbor,2012). Penelitian awal tentang kepemimpinan berupaya untuk membuat suatu daftar dari sifat sifat bawaan (trait) yang khas, yang dibutuhkan agar seorang pemimpin dapat menjadi efektif, sehingga kemudian memunculkan ungkapan "pemimpin dilahirkan bukan dibentuk" (Jago, 1982). Sebagai contoh, Weber, Henderson dan Parsons (1947) menggambarkan sifat bawaan seperti karisma sebagai suatu "hadiah ilahi", dan pemimpin karismatik seringkali mampu menunjukkan talenta dan menjadi pemimpin yang efektif di saat krisis.

Namun demikian, pada kemudian hari para peneliti mulai mempertanyakan pendekatan ini karena berbagai studi tidak memberikan hasil yang konklusif tentang adanya sifat-sifat bawaan yang universal, yang perlu dimiliki seorang pemimpin agar berhasil di jabatannya (Ghiselli & Brown,1955). Di akhir perang dunia ke dua, peneliti mulai mengalihkan arah topik dari upaya mencari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, menjadi investigasi tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang pemimpin (Stogdill, 1973). Melalui pencarian untuk menemukan gaya khas dari seorang pemimpin yang efektif ini, studi perilaku pemimpin pada akhirnya menekankan pada hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Dua dari jenis penelitian ini yang paling terkenal adalah yang berasal dari studi di Ohio State University dan University of Michigan. Kedua studi ini menemukan bahwa perilaku pemimpin dapat dijelaskan melalui model dua dimensi orientasi tugas dan hubungan (Fleishman & Hunt, 1973).

Akan tetapi, apa yang dapat membuat seorang pemimpin menjadi efektif, tetaplah sukar untuk dipahami. Berbagai penelitian awal yang berupaya untuk menemukan gaya kepemimpinan yang terbaik untuk setiap situasi, belumlah berhasil menemukan jawabannya (Kaiser & DeVries, 2000). Para peneliti seperti Fiedler (1964), kemudian menyadari bahwa upaya untuk menemukan gaya kepemimpinan yang effektip adalah sia-sia belaka, karena efektivitas dari suatu gaya kepemimpinan akan tergantung dari konteksnya. Dari pengertian ini, berbagai penelitian tentang kepemimpinan kemudian bermunculan, dengan menambah variabel situasional untuk menemukan efektifitas kepemimpinan. Sebagai contoh, teori kontingensi dari Fiedler menggambarkan suatu kontinuum dukungan bagi pemimpin berdasarkan faktor faktor situasional seperti keterandalan kelompok, kejelasan tugas dan kekuasaan formal.

Pendekatan situasional lainnya adalah teori kontinum kepemimpinan, dengan variabel situasional tingkat kebebasan yang didelegasikan kepada bawahan, dan seberapa besar otoritas yang digunakan oleh pemimpin (Tannenbaum & Schmidt, 1958). Demikian juga teori kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard (1977) yang menganggap bahwa gaya kepemimpinan yang paling tepat harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan bawahan dan jenis tugas yang harus dilaksanakan oleh mereka. Walaupun berbagai teori ini cukup membantu dalam menjelaskan pentingnya variabel situasional terkait dengan efektifitas kepemimpinan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sebagai contoh, "apakah seorang pemimpin perlu mengubah gayanya untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada, atau apakah variabel situasional yang seharusnya disesuaikan dengan gaya kepemimpinannya?" Mungkin jawabnya adalah bukan keduanya. Seperti

disampaikan oleh Fleenor (2006), dalam Jurnal Psikologi Sosial Effective Multicultural Leadership menyatakan bahwa peneliti telah meninggalkan pendekatan yang murni berbasis situasional ataupun sifat bawaan. Sebaliknya, mereka mulai memahami bahwa kepemimpinan yang efektif adalah hasil dari interaksi antara sifat bawaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, dengan situasi yang dihadapainya.

Studi Kepemimpinan Kontemporer Penelitian yang lebih baru masih memperhatikan orientasi tugas dan hubungan. Meski demikian, telah muncul variabel-variabel baru. Sebagai contoh, salah satu studi kepemimpinan kontemporer yang paling banyak diteliti (Hyland, Reeves, & Caputo, 2018), adalah teori kepemimpinan transformasional dari Bass (1985). Berasal dari studi oleh Burns (1978) tentang pemimpin karismatik, Bass mengatakan bahwa seorang pemimpin dapat secara efektif mentransformasikan sikap, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh bawahannya. Kemampuan untuk menginspirasi orang lain dengan tujuan bersama. Hal ini disebut oleh Bass sebagai pengaruh teridealisasikan (idealized influenced), yang tidak lain adalah karisma (Hinkin & Tracey, 1999).[4]

Merujuk pada teori Kepemimpinan yang efektif di atas, maka Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diharapkan akan menghasilkan Pemimpin yang effektip dengan Pola Hidup "New Normal Life" dalam suasana datangnya gelombang Pandemi Covid-19 yang belum punah karena belum ditemukannya Vaksin utk Covid-19. Oleh karenanya, Kepemimpinan hasil Pilkada 2020 harus mampu beradaptasi dengan Protokol Kesehatan dan Pola Hidup Normal Baru dengan berbasis Multikultural serta memiliki "napas panjang" karena ia akan diuji kesabarannya ketika melintasi jalan panjang itu. Kalau tidak, ia akan mudah memilih jalan pintas yang penuh dengan cita rasa otoriter.

Seorang pemimpin di daerah perlu serius mengelola keragaman yang ada sehingga memperkecil potensi konflik yang bisa muncul. Demikian pula pada level nasional, pemimpin lokal yang berkarakter 'Nasionalis" haruslah sosok yang sanggup mengelola dan mentransformasikan keragaman bangsa sebagai kekuatan perubahan menuju Indonesia yang lebih bermartabat terutama disaat menghadapi New Normal Live di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Pada proses dan hasil Pilkada Serentak tahun ini, diharapkan para pemimpin hendaknya terus bersinergi atas nama penghargaan dan keberpihakan terhadap "Nasionalisme dan Kenegarawanan serta Berkesetaraan Gender" karena jumlah perempuan dengan laki-laki hampir sama. Hal ini memungkinkan terjadinya saling silang budaya dan peradaban yang memperkaya pergaulan antar Suku, Agama, Status Sosial , Ras dan Pandangan Hidup demi sebuah komitmen dan integritas pemimpin yang bermartabat, adil, damai, dan negarawan.

Untuk tujuan ini, seorang pemimpin perlu terus belajar dan berbenah diri. Belajar memahami dan mengelola keragaman yang ada di sekitarnya dengan keteladanan Hidup Normal Baru, Belajar pula merendahkan diri. Demikian pula belajar konsisten dan komitmen pada panggilan/amanah yang dipercayakan kepadanya. Untuk itu, Kepemimpinan Berbasis Multikultur dalam Pola hidup Normal yang baru paling tidak memerlukan 4 kompetensi dasar yaitu:

Pemimpin Perubahan yang mampu menghadapi krisis Dampak Pandemi Covid-19.

Penyebaran penyakit Covid-19 yang begitu cepat telah membuat seluruh negara bergerak sedemikian rupa untuk menangani masalah ini. Indonesia pun tak lepas dari masalah ini, penyebaran virus corona

sudah sampai di Tanah Air. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 merupakan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Tercatat tanggal 31 Mei 2020, lebih dari 6,05 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 188 negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih dari 368.000 kematian; lebih dari 2,56 juta orang telah pulih.[5]

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) , dampak Pandemi global Covid-19 membuat ekonomi global mengalami penyusutan sebesar 3% tahun ini, IMF menggambarkan penurunan ekonomi ini sebagai yang terburuk sejak Depresi Besar (resesi berkepanjangan) pada Tahun 1930-an. Mereka menyatakan pandemi ini telah mendorong dunia ke dalam "krisis yang belum pernah ada sebelumnya".IMF juga menambahkan wabah berkepanjangan akan menguji kemampuan negara-negara di dunia dan bank sentral dalam mengendalikan krisis. Gita Gopinath, ekonom IMF, mengatakan krisis ini bisa menghabiskan US$9 triliun GDP global selama dua tahun. Hal Ini telah menyebabkan penundaan atau pembatalan acara olahraga, agama, politik, dan budaya, kekurangan pasokan yang meluas diperburuk oleh rasa panik, dan penurunan emisi polutan dan gas rumah kaca. Sekolah, universitas, dan perguruan tinggi telah ditutup baik secara nasional maupun lokal di 177 negara, mempengaruhi sekitar 98,6 persen populasi siswa dunia. Informasi yang salah tentang virus telah menyebar melalui media sosial dan media massa.[6]

Bencana global Pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan China tersebut di atas, telah merubah rencana strategis negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia karena dampak Pandemi Covid-19 tersebut berakibat luas terhadap kesehatan, kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan keamanan serta seluruh aspek kehidupan lainnya dan akan berimplikasi terhadap Ketahanan Nasional Indonesia dan Ketahanan Keluarga serta Ketahanan Individual. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 2,5% atau bahkan 0% alias tidak tumbuh sama sekali jika pandemi tak bisa diatasi. Hal ini berdasarkan beberapa skenario yang disiapkan Kementerian Keuangan dalam menghitung dampak pandemi corona terhadap perekonomian. Dia menyebutkan skenario pertumbuhan ekonomi 0-2,5% terjadi jika virus corona semakin berat, dalam arti Indonesia tidak mampu menangani pandemi lebih dari enam bulan dan terjadi karantina wilayah atau lockdown. Selain itu, jika perdagangan internasional tumbuh di bawah 3 %, serta industri penerbangan mengalami shock hingga anjlok 75%. Skenario tersebut juga mempertimbangkan konsumsi rumah tangga, terutama konsumsi bahan pokok dan kesehatan. "Juga kemungkinan terjadinya disrupsi tenaga kerja".[7]

Perkiraan Menteri Keuangan Sri Mulyani di atas tentu mengejutkan publik dan akan berdampak besar terhadap persepsi masyarakat ditambah lagi beberapa ahli memperkirakan akan datang gelombang kedua Pandemi Covid-19 tersebut. Untuk itu diperlukan peran besar seorang pemimpin mengkomunikasikan situasi krisis Pandemi Covid-19 kepada publik. Ketika situasi krisis diumumkan, pastilah akan berdampak pada melebarnya kepanikan. Di sinilah pentingnya seorang pemimpin dengan komunikasi yang efektif harus dibangun untuk menghadapi krisis dimaksud.

Marra (1997) menyatakan, "Banyak taktik public relations konvensional yang diterima, tidak berkontribusi untuk mengelola krisis dengan baik. Pola pikir krisis publik saat ini harus digantikan salah satunya adalah memungkinkan setiap pemimpin berlatih public relations. Dalam pada itu, JE Grunig dari University of

Maryland, memposisikan teorinya dalam teori keunggulan public relations (PR). Banyak kajian literatur dan temuan yang digunakan untuk mengembangkan teori dan praktek dalam menghadapi krisis. Untuk menjadi sangat baik, Marra percaya bahwa krisis yang dihadapi PR harus strategis, memiliki fokus simetris dua arah, memiliki wewenang untuk bertindak cepat. Dalam konteks ini, Peranan dan metodoogi berkomunikasi atas Kepemimpinan para Gubernur, Bupati dan Walikota yang sesuai karakteristik daerah dan budaya rakyat yang dipimpinnya menjadi kata kunci keberhasilan pimpinan daerah hasil Pilkada Serantak tahun 2020.

Dalam rangka menggabungkan komunikasi menghadapi krisis menjadi kerangka yang lebih strategis, sejumlah peneliti mengategorikan fungsi ini sebagai manajemen krisis. Pearson dan Clair (1998) mendefinisikannya sebagai upaya sistematis untuk menghindari krisis atau untuk mengelola krisis yang terjadi. Untuk mencapai kondisi tersebut, organisasi menerapkan rencana manajemen krisis yang terdiri dari berbagai proses penuh pemikiran dan langkah mengantisipasi sifat kompleks krisis (Caywood & Stocker, 1993). Termasuk dalam langkah tersebut adalah penunjukan tim krisis, proses komunikasi, penilaian pemangku kepentingan, prakarsa hubungan media, dan evaluasi pasca-krisis.

Kepemimpinan dalam mengatasi perubahan, menetapkan arah, menyelaraskan orang, memotivasi dan menginspirasi- serta mengawasi orang untuk bergerak ke arah yang benar menjadi hal yang sangat penting, meskipun hambatan utama untuk berubah sering muncul jika dikaitkan dengan kebutuhan manusia, nilai, dan emosi (Kotter, 1999). Menurut Grunig (1992), “pemimpin yang sangat baik memberikan visi dan arahan untuk organisasi, menciptakan ketertiban keluar dari kekacauan.” Selama peristiwa krisis, pemimpin harus menjadi katalis keberhasilan atau batu kilangan kegagalan. Krisis adalah tentang ketidakpastian dan ketakutan. Kepemimpinan adalah tentang antisipasi, visi, fleksibilitas dan pemberdayaan (Byrd, 1987). Oleh karena itu, kepemimpinan multikultur dalam menghadapi Covid-19 bila dianggal sebagai Krisis sosial adalah kemampuan pemimpin untuk memberikan visi dan arah selama waktu perubahan dan ketidakpastian. Kepemimpinan yang efektif selama masa krisis seperti Wali Kota New York Rudy Giuliani memperkuat tekad organisasi untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat: terguncang, tetapi tegas dan bertekad untuk membentuk masa depan daripada sekadar menyesuaikannya. Komunikasi efektif di masa krisis dimasa pandemik ini Elemen dasarnya adalah komunikasi yang tidak boleh dipandang enteng.[8]

Merujuk pada teori di atas, Seorang Pemimpin Berbasis Multikultur dalam memasuki kehidupan Normal baru setidaknya ada beberapa rekomendasi untuk mempersiapkan *new normal* di Indonesia.

1. **Menjadi Pemimpin Yang adaptif terhadap Perubahan.** Untuk itu, ia harus dapat beradaptasi dengan suasana baru dalam hal sebagai berikut:
    a. Mengambil Hikmah adanya Pandemi Covid-19 yaitu membiasakan hidup selalu bersih serta mendorong setiap orang untuk membiasakan diri hidup bersih, memakai masker, cuci tangan serta *social distancing*.
    b. Mitigasi kesehatan masyarakat dan sosial, ekonomi, serta psikologis Dalam langkah ini, pemerintah bersama penduduk harus tetap mengutamakan *public health* atau kesehatan masyarakat. Selain itu, masalah sosial, ekonomi dan

psikologis perlu dipersiapkan mitigasinya sejak saat ini.

c. Perkuat resilien komunitas. Tidak jauh berbeda dari sebagian aspek dalam mitigasi di atas. Resilien komunitas berarti kita harus memperkuat kultural komunitas. Kultural atau budaya yang baik dari komunitas di masyarakat baik lokal maupun skala besar akan berkaitan juga dengan kehidupan sosial Indonesia usai pandemi.

d. Pelepasan pembatasan sosial dan pemulihan pembatasan sosial secara bertahap, karena tidak mungkin untuk dilepaskan sekaligus. Pembatasan sosial yang dilepaskan bertahap ini juga seiring dengan pemulihan yang bertahap.

e. Reformasi struktural perlu dilakukan untuk merespon cepat mengatasi krisis kesehatan dan menuju ekonomi baru. "Untuk itu pemimpin harus siap melakukan berbagai perubahan birokrasi, struktural belajar dari penanganan pandemi ini.

2. **Menjadi "Cultural Ambasador".** Cultural Ambasador artinya, seorang pemimpin harus memiliki Kompetensi dasar yang merepresentasikan kemampuan merekatkan nilai-nilai Kebhinnekaan Kultural dalam masyarakat majemuk dan plural dimana seorang pemimpin berada dan menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat atau organisasi tertentu, sehingga pemimpin tersebut dapat menjadi simbol perekat masyarakat yang dipimpinnya tanpa membedakan Suku, Agama, Ras dan Pandangan Hidup masyarakat yang dipimpinnya.

3. **Solidaritas Maker.** Solidaritas Maker artinya, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi merajut Solidaritas dalam Kebhinnekatunggalika-an yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Kebhinnekaan masyarakat yang pluralis dari perspektif Suku, Agama, Ras dan Pandangan Hidupnya.

4. ***Communication Leader***. *Communication Leader* artinya, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi menyampaikan pesan-pesan yang memotivasi masyarakat yang dipimpinnya dengan muatan kausa kata yang penuh etika, bermartabat, tidak emosional dan tidak memasuki domain yang bukan wilayah Tugas Pokok dan Fungsinya. Dengan demikian, setiap ucapannya sesuai dengan perbuatannya yang mengandung keteladanan serta terukur dampaknya terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Disamping itu, seorang Pemimpin berbasis Multikultural harus memiliki Integritas Diri, memerlukan landasan berpikir secara Holistik, Komprehensip Integral dan Wawasan Kebangsaan Yang Luas serta kejujuran berpikir, kejujuran berucap dan kejujuran bertindak untuk secara transparan menyampaikannya kepada masyarakat, meski disadari tidak ada manusia yang sempurna, namun idealisme dan nasionalisme harus tetap kita jaga dalam ucapan dan tindakan yang tidak melanggar norma-norma budaya dan agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemimpin yang memiliki integritas adalah Pemimpin yang memiliki karakter antara lain: Jujur, Santun, Beretika, Demokratis, Transparan, Bermoral, Memiliki Pengetahuan dan Wawasan luas, Berkesetaraan Gender, Religius, Suka bergotong royong, Disiplin, Tidak Egois, Rasional tidak Emosional, dapat

mengatakan yang benar itu benar dan mampu melaksanakannya serta mampu mengatakan yang salah itu salah serta mampu menghindarinya. Dengan memperhatikan karakter pemimpin yang memiliki integritas tersebut di atas, dapat kiranya digunakan oleh setiap individu untuk berkaca diri : Pantaskah aku menjadi seorang Pemimpin dengan Karakter yang memiliki Integritas? Untuk menjadi Pemimpin yang memiliki Intergitas Berbasis Multikultur , tidak cukup hanya bermodalkan "Titel Akademis atau Bintang" dipundaknya. Tetapi seorang Pemimpin harus memiliki sifat Negarawan, Visioner berfikir global bertindak local dengan mengakomodasikan "Kearifan Lokal" karena, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.

Sebagaimana telah diuraikan dalam data Supas BPS tahun 2015 tersebut di atas, jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan laki-laki. Dengan demikian secara kuantitas Peranan Perempuan sangatlah penting karena peranan Perempuan tidak bisa digantikan laki-laki dalam melahirkan putra putrinya serta ikut mendidik keluarganya dan masyarakat untuk Masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Diharapkan hasil Pilkada Serentak tahun 2020 akan lahir pemimpin-pemimpin perempuan karena dengan berkembangnya pemahaman dan kesadaran tentang kesetaraan gender sejak terbitnya buku Habis Gelap Terbitlah terang kisahnya RA Kartini dan sejarah membuktikan para pahwan kemerdekaan seperti Cut Nyak Dien, serta banyak lagi pahlawan perintis Kemerdekaan Indonesia membuktikan Peranan Perempuan sangat sentral dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan di Indonesia khususnya dalam membentuk SDM Unggul masa kini dan masa depan.

Mengacu kepada data BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami kenaikan, dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga tercatat naik dari 71,39 pada 2016, menjadi 71,74 pada 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Meskipun tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Perempuan lebih rendah dibanding TPAK Laki-laki, yakni hanya di angka 55 persen, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal juga tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan.[9]

Dalam sepuluh tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan. Perempuan bekerja juga masih sangat rentan untuk terpapar *economic shocks*. Sekitar 26 persen pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga. Selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah, yang proporsinya mencapai 89 persen atau sekitar 43,8 juta jiwa[10]. Dengan adanya Pandemi Covid-19, serta belum ditemukannya Vaksin Covid-19, kemungkinan besar akan semakin mengurangi kemampuan kinerja Perempuan dalam membentuk SDM Unggul terutama dalam menghadapi Era Bonus Demografi. Kondisi ini akan berpengarauh terhadap Ketahanan Nasional.

Mengingat Indonesia kaya dengan keberagaman budayanya dihuni oleh penduduk dengan bahasa lebih kurang 700 bahasa etnis dan lebih kurang 358 suku dan 200 sub suku bangsa, dengan komposisi agama 88,1 % Islam, 7,89 % Nasrani, 2,5 % Hindu, 1 % Budha, 1 % kepercayaan dan Kong

Hu Chu, mempunyai adat istiadat, sikap, perilaku, dan lokal wisdom masing-masing yang berbeda mulai dari Sabang sampai Merauke, sehingga dengan demikian akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan kualitas serta rawan terhadap perbedaan kepentingan sehingga diperlukan karakter pemimpin yang mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi pluralis tersebut. Hal ini sangat diperlukan karena pemimpin yang berkualitas dan bijaksana menampung kebhinnekaan sangat dibutuhkan bangsa ini, tidak hanya kualitas yang bersifat fisik, intelektual atau moral semata tapi juga kualitas pemimpin yang mampu membumi sehingga menyatu dengan sikap karakter dan perilaku masyarakatnya. Untuk itu, mau tidak mau setiap pemimpin ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia ini, harus mampu mengakomodir dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena akumulasi dari kedua nilai tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kepemimpinan nasional dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Disamping itu, Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila yang menganut system "Multi Partai" yang rawan terhadap berbagai konflik kepentingan, konflik agama, konflik partai dan konflik budaya serta konflik Ideologi, sehingga mutlak diperlukan adanya Kepemimpinan Berbasis Multi Kultural yang mampu mengelola perbedaan menjadi suatu kekuatan yang maha besar dalam arti eksisnya secara optimal sinergitas para pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya beserta perangkat institusi formal, non formal maupun informal secara vertikal, horisontal maupun diagonal yang berbasis keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang setiap saat siap menghadapi segala hambatan, ancaman, hasutan, gangguan dan tantangan dalam rangka mengawal keutuhan NKRI.

Perkembangan lingkungan strategis baik global, regional, nasional maupun lokal sebagai implikasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi serta adanya isu-isu strategis dibidang HAM, Demokrasi, Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah, Primordialisme dan Etno Centris secara cepat merasuk setiap saat ke sendi-sendi kehidupan kita dalam bernegara baik dari perspektif geografi, demografi maupun kekayaan alam serta ekonomi, politik, hukum, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Situasi dan kondisi ini, memerlukan para Pemimpin yang kuat dan utuh yang setiap saat pemimpin tersebut memiliki "Mind Set" dan "Mental Model Berbasis Multi Kultural" dan berkarakter "Negarawan" sebagai wujud kehadiran Negara dalam mengelola konflik-konflik kepentingan yang dapat mengancam ketahanan nasional sekaligus keutuhan NKRI.

Hal di atas penting untuk diingatkan karena banyak pemimpin yang tidak memimpin karena ia gagal mengelola keberagaman karakteristik budaya dan kearifan lokal dari orang-orang dan lingkungan yang dipimpinnya. Contoh kasus lahirnya konflik-konflik vertikal maupun konflik horisontal di berbagai daerah di Indonesia seperti Kasus Ambon, Konflik di Aceh dan Papua, Sampit dan lain-lain merupakan bukti adanya konflik-konflik yang salah satu penyebabnya karena ketidakmampuan para pemimpin dalam memimpin keberagaman etnis, agama, budaya dan rakyat yang memiliki karakteristik yang saling berbeda.

Atas dasar itulah dapat dikatakan bahwa "Kepemimpinan Berbasis Multi Kultural" memiliki karakter "Negarawan" merupakan kepemimpinan yang mengakui adanya perbedaan dan "Adil" memperlakukan perbedaan tersebut. Kepemimpinan Berbasis Multi Kultural mutlak diwujudkan dengan

ruhnya adalah Kepemimpinan yang Negarawan, Visioner dan Kontemporer, karena sebuah negara akan maju dan berkembang sangat tergantung kepada para pemimpinnya yang memiliki karakter kenegarawanan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial budayanya. Yang dimaksud Pemimpin Negarawan disini adalah seseorang Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga seluruh pikirannya, waktunya, tenaganya, pandangan hidupnya bahkan jiwa raga dan aset-asetnya rela dikorbankannya untuk bangsa dan negaranya. Sebaliknya, sebuah negara disebut gagal juga sangat dipengaruhi oleh tidak mampunya para pemimpinnya memimpin rakyatnya sesuai kondisi lingkungan strategis sosial budaya rakyat yang dipimpinnya. Sudah banyak contoh, negara makmur dan sentosa karena dipimpin oleh para pemimpin berbasis Multi Kultural yang mampu memimpin rakyatnya secara baik, sebaliknya seorang pemimpin yang hanya mementingkan golongannya hancur berantakan seperti terjadi di Negara 2 Ex USSR, Yogoslavia, serta Irak dan Iran serta Afganisthan. Dengan latar belakang hal-hal yang dikemukakan di atas, maka diperlukan Pemimpin yang Negarawan, Visoner serta Kontemporer Berbasis Multi Kultural.

Untuk mewujudkan Pemimpin yang Negarawan, Visoner serta Berkesetaraan Gender berbasis Multi Kultural disaat Pandemi Covid-19, masih ditemukan Beberapa permasalahan baik dari Perspektip Tantangan Akibat Covid-19, Kualitas SDMnya, masih adanya sifat Primordialisme, dan Ego Sektoral yang menghambat tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut **:**

1. **Tantangan disaat Pandemi Covid-19.** Wabah Covid -19 yang kini melanda seluruh belahan dunia telah membawa dampak yang signifikan di semua sektor kehidupan. Meski demikian, Para Pemimpin serta birokrasinya tidak boleh berhenti bergerak dan harus adaptif terhadap perubahan tersebut. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap sigap melayani masyarakat di tengah maraknya pandemi. “Dengan adanya wabah ini, sebagai seorang ASN dan juga pemimpin perubahan, Para Pemimpin hasil Pilkada serentak tahun 2020 harus mencari solusi dengan segala keterbatasan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Hal ini ditengarai bahwa seluruh dunia kini juga menghadapi masalah yang sama, baik secara sosial, ekonomi, pelayanan dan sebagainya. Bagi para Pemimpin yang terpilih nanti Pasca Pilkada serentak tahun 2020 tidak ada pilihan lain selain bergerak. Bahkan dituntut untuk adaptif dengan situasi yang ada. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang bisa dijadikan panutan, yang mampu melihat permasalahan yang dihadapi bangsa, serta mencari solusi untuk memecahkannya. Sebagai pemimpin yang baru terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 harus mampu menjadi Pemimpin perubahan dalam pola hidup normal yang baru, harus mampu membaca situasi dan memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, dengan memanfaatkan berbagai media teknologi informasi yang ada. Memang bukan situasi yang mudah untuk melakukan ini, tetapi pemimpin selaku pengambil kebijakan akan selalu dihadapkan pada dinamika lingkungan yang tidak bisa diprediksi.
2. **Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah.** Berdasarkan data BPS tahun 2015, rata-rata pendidikan di Indonesia adalah Sekolah Menengah

Pertama. Bahkan UNDP tahun 2015 mengemukakan rata-rata penduduk Indonesia berumur 6 sampai dengan 25 tahun hanya mengenyam pendidikan 5,8 tahun. Artinya belum lulus sekolah dasar. Dengan kondisi tingkat pendidikan yang rendah tersebut tentu berimpilkasi terhadap kualitas Sumber Daya Manusia yang ada baik dari aspek kesehatan, pendapatan, sosial budaya, ekonomi, politik dan lain-lain terlebih saat kita memasuki Bonus Demografi. Oleh karena itu, jangan heran jika di beberapa daerah masih sering terjadi konflik fisik antar suku, antar pemeluk agama maupun antar komunitas seperti di Ambon, Kalimantan, Papua, bahkan di kota-kata besar sering terjadi tauran antar pelajar maupun mahasiswa atau antara aparat keamanan dengan masyarakat misalnya karena perbedaan persepsi tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang ekonomi maupun kesenjangan ekonomi. Hal ini, akibat pendidikan rendah, wawasan dan pengetahuan di dalam masyarakat umumnya belum kondusif. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas keamanan dan politik yang mengakibatkan para Pemimpin berbasis Multikultur harus bekerja lebih keras menghadapi Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah tersebut.

3. **Primordialisme.** Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Kondisi Primordialisme di Indonesia, secara tidak sadar mendorong masyarakat Indonesia mengembangkan ikatan-ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas berlebihan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu kelompok agama, ras, daerah, kelompok politik atau keluarga tertentu. Padahal loyalitas yang berlebihan terhadap budaya sub nasional tersebut, dapat mengancam integrasi bangsa karena primordialisme mengurangi loyalitas warga negara pada budaya nasional dan negara sehingga mengancam kedaulatan negara.

4. **Ego Sektoral.** Setiap Kementerian/ Lembaga Pemerintah, memiliki visi, misi maupun program dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya. Dengan alasan untuk mewujudkan visi, misi, program dan tugas pokoknya tersebut, sering menimbulkan ego sektoral yang pada gilirannya memunculkan konflik kepentingan, apalagi jika menteri yang bersangkutan berbeda partai politik dengan menteri yang berseberangan partai politik dengan menteri yang bersangkutan.Hal ini sering terjadi berulang-ulang setiap tahun sehingga menjadi **"Budaya"** di setiap Kementerian. Menteri Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu dalam RTD Membangun Industri Perkapalan Nasional Guna Kemandirian Ekonomi Bangsa Dalam Rangka Mensuksekan Pembangunan Nasional di Lemhannas mengemukakan bahwa Pembangunan Industri Perkapalan dan Sektor Perikanan sulit berkembang karena sektor perpajakan membebani investor dengan berbagai macam/jenis pajak. Akibatnya, pembangunan perkapalan dan sektor kelautan dan perikanan sulit bersaing dengan Negara lain di pasar global.

5. **Etno Centris.** Era Otonomi Daerah menimbulkan sekat-sekat kepemimpinan antara pusat dan daerah serta menimbulkan sifat etno sentris. Artinya, era otonomi daerah yang mengistimewakan secara berlebihan putra daerah untuk menduduki jabatan pimpinan di institusi tertentu tanpa

mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki yang bersangkutan. Akibatnya, dengan keterbatasan pengalaman, wawasan maupun skill dan kompetensi yang bersangkutan, dapat berbenturan dengan kepentingan nasional yang lebih besar. Konflik kepentingan yang ditimbukan etnosentris ini adalah suatu kondisi dinamis dimana seseorang yang menduduki posisi tertentu karena tugas dan tanggung jawabnya terdorong hanya mementingkan daerahnya atau golongannya yang bersinggungan dengan kepentingan pihak lain. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut menjalankan tugasnya. Konflik kepentingan akibat etnosentris ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu professi karena dianggap tidak etis atau tidak memenuhi azas kepantasan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dia atas, beberapa solusi alternatifnya adalah:

1. **Sikap Pemimpin harus bijak dalam menghadapi tantngan di Masa Pandemi Covid-19.** Tatanan new normal dan kebiasaan baru yang muncul bagi para pekerja di sektor pemerintahan maupun privat akibat pandemi Covid-19 mewabah, menuntut setiap orang untuk jadi leader atau pemimpin bagi dirinya sendiri yang mampu membaca situasi dan menyesuaikan diri. Tak dipungkiri, kebijakan pembatasan sosial berskala besar secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi roda kegiatan di seluruh sektor kehidupan.

   Surya Tjandra Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN mengatakan di masa sekaraang ini dibutuhkan pemimpin yang bisa memfasilitasi. “Salah satunya dengan membangun ruang untuk bisa belajar bersama, sharing untuk berbagi pengalaman dan pekerjaan yang sedang dijalankan,” ungkapnya saat melakukan diskusi langsung via Instagram bersama dengan Aakar Abyasa CEO dan Founder Jouska yang membahas tentang Pentingnya Leadership di Era *New Normal*, Jumat (01/05/2020). Terlebih lagi, sistem kerja yang biasanya dilakukan di kantor kemudian diubah menjadi *work from home* (WFH), bekerja dari jauh atau *remote working* menuntut pemimpin untuk mengubah strategi, yaitu bagaimana pekerjaan setiap individu bisa tetap produktif dan kreatif sehingga seluruh program kerja tetap berjalan dengan baik.

   Senada dengan Surya Tjandra, Aakar Abyasa CEO dan Founder Jouska mengatakan di situasi sekarang ini semua orang memang dituntut untuk jadi pemimpin, baik dari pejabat pemerintah dan orang-orang yang punya usaha sendiri. “Mengutip kata-kata yang banyak di buku, leadership itu 90% tentang bagaimana kita bereaksi terhadap situasi di lingkungan kita, 10% bagaimana kita bereaksi tentang apa yang terjadi dengan kita. Jadi, reaksi kita terhadap situasi saat ini sangat penting,” Dalam kondisi seperti sekarang ini, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat juga harus bisa diajak berpartisipasi terlebih dahulu. “Pemerintah harus menunjukkan empati jadi masyarakat mau terlibat,”

2. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.** Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam masyarakat multikultur di Indonesia, memerlukan pemikiran jangka panjang agar kaderisasi di partai-partai politik khususnya serta jabatan profesional di pemerintahan maupun di sektor swasta pada umumnya perlu melibatkan keteladanan dari

Pemimpin berbasis multikultur utamanya dalam pembinaan partai-partai politik yang menghasilkan para pemimpin nasional di masa kini maupun mendatang. Untuk meningkatkan keterlibatan unsur kearifan lokal dalam membangun budaya politik yang kondusif agar partai-partai politik dapat menghasilkan pemimpin nasional yang berorientasi kepada kepentingan rakyat diperlukan: (1) Kesediaan menerima adanya perbedaan. (2) Setiap kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat melibatkan pemimpin informal maupun non formal yang ada di wilayah bersangkutan mulai dari persiapan perencanaan kegiatan sampai dengan pengawasannya. (3) Beradaptasi dengan adat istiadat setempat. (4) Menghapus rasa ego sektoral. (5) Menghilangkan etno sentris dalam memilih pemimpin formal, Informal maupun Non Formal. (6) Patuh Azas disertai Penegakan Hukum yang tepat dan tegas artinya Hukum jangan runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. (7) Para Pemimpin disemua tingkatan di pusat dan daerah meningkatkan intensitas pertemuan-pertemuan periodik secara berkala untuk membahas isu-isu strategis yang sedang aktual dibicarakan masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur media, LSM maupun tokoh, agama, tokoh masyarakat dan para Akademisi. (8) Menyatukan unsur-unsur yang berbeda yang menimbulkan konflik dan melakukan pengendalian konflik baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu, dari perspektif sistem pendidikan nasional, perlu diimplementasikan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan secara optimal .

3. **Menghilangkan Primordialisme.** Kecenderungan adanya "Primordialisme" timbul apabila setiap kelompok kultural yang terorganisasi secara politik akan mengembangkan politik aliran yang dapat mengancam persatuan bangsa. Selanjutnya, kelompok-kelompok masyarakat tersebut akan mengajukan tuntutan untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya seperti tuntutan pembagian sumber daya alam yang lebih seimbang antara pusat dan daerah. Apabila tidak diakomodasi, tuntutan kelompok masyarakat tersebut akan berkembang menjadi gerakan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, gerakan separatisme Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka dan lain-lain.

Selanjutnya kita ketahui, di dalam masyarakat Indonesia terdapat Kemajemukan atau perbedaan suku bangsa, bahasa, ras, agama, tradisi budaya, dan adat istiadat. Contoh kemajemukan tersebut tercermin pada adanya komunitas keturunan Tionghoa, India, dan penduduk pribumi . Perbedaan etnik, suku bangsa, agama, dan budaya tersebut dapat menjadi pemicu sulit terintegrasi dalam satu kesatuan sosial. Oleh karena itu, untuk menangkal gejala primordialisme, setiap kelompok masyarakat harus mengembangkan budaya toleransi terhadap budaya kelompok lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa tanpa pengingkaran budaya sendiri. Keberanekaragaman budaya dan agama dalam masyarakat terbentuk atas dasar identitas budaya. Identitas budaya adalah kategori pembeda berdasarkan nilai-nilai budaya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hal itu terjadi karena tiap identitas kultural memiliki sentimen primordial tertentu yang mempengaruhi ikatan politik, persilangan, dan interaksi sosial

di antara kelompok etnik di dalam masyarakat.

Dari uraian di atas terlihat jelas betapa kompleksnya primordialisme di Negara Indonesia. Atas dasar itulah , setiap pemimpin nasional yang negarawan, Visioner, berbasis Multi Kultural perlu mempunyai sikap toleransi yang tinggi, sehingga antara kelompok sesama bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Ingatlah "Sumpah Pemuda" dan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi semboyan bangsa Indonesia dimana saja dan kapan saja. Sesungguhnya, mengatasi primordialisme ini, Para ahli banyak memberikan pandangannya melalui teori-teori kepemimpinan tradisional, teori kepemimpinan modern, teori kepemimpinan global, teori kepemimpinan lintas budaya, teori kepemimpinan transformasional, teori kepemimpinan kontemporer, teori kepemimpinan negarawan dan lain-lain. Kesemua teori-teori kepemimpinan tersebut di atas, lahir dari pengalaman empiris dan teoritis sang penulis pada kondisi tertentu, saat tertentu, serta ruang dan waktu tertentu. Berbagai definisi kepemimpinan telah dirumuskan oleh para ahli yang intinya dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan adalah suatu proses yang melibatkan pemimpin, yang dipimpin, situasi dan kondisi yang berlaku dalam bentuk adat istiadat budaya, norma , system bermasyarakat serta bagaimana komunikasi dan interaksi yang dibangun antara pemimpin dan yang dipimpin.

Bertitik tolak dari pemahaman tentang definisi kepemimpinan tersebut di atas, Kekurang berhasilan para pemimpin di Indonesia akibat adanya primordialisme dalam menjalankan peran kepemimpinannya, tidak bisa semata-mata dilihat pada individu pemimpin tersebut, tetapi harus dilihat secara lebih luas. Bagaimana situasi yang dihadapi, bagaimana para bawahan yang dipimpin, bagaimana sistem budaya yang dianut, semua ikut berpengaruh terhadap efektifitas seorang pemimpin menghadapi primordialisme. Sebenarnya, telah ada suatu teori kepemimpinan dengan pendekatan situasional versi Indonesia, tetapi kurang banyak dikembangkan untuk mengantisipasi timbulnya primordialisme tersebut sebagimana telah dikemukakan Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswanya yang mengajarkan bahwa seorang guru (yang dalam pendekatan "Pedagogik" berarti memimpin) harus bisa bersikap "Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani". Artinya, ketika di depan pemimpin memberi contoh, ketika di tengah pemimpin memotivasi, membangun kehendak, memberi inspirasi, ketika di belakang pemimpin memberi semangat, memotivasi dalam keberagaman budaya yang ada

4. **Menghilangkan Ego Sektoral.** Untuk menghilangkan ego sektoral, diperlukan kepemimpinan yang mampu bertindak sebagai *designer* dan *arranger,* berpikir dan bertindak holistik, komprehensip integral, bekerja hanya untuk kepentingan bangsa dan Negara meskipun pemimpin bersangkutan bekerja di instansi tertentu, sektor tertentu maupun daerah dan etnis tertentu. Untuk itu, kata Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) menjadi kata-kata kunci yang bukan hanya dalam ucapan tetapi juga perbuatan guna menghilangkan rasa ego sektoral tersebut. Disamping itu, diperlukan tenggang rasa, artinya dalam menghadapi persoalan sektoral

tidak hanya merasa pintar tetapi juga pintar merasa posisi sektor lain agar tidak terjadi benturan-benturan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara.

5. **Menghilangkan Etno Centris.** Era Otonomi Daerah menimbulkan sekat-sekat kepemimpinan antara pusat dan daerah serta menimbulkan sifat etno sentris. Artinya, era otonomi daerah yang mengistimewakan secara berlebihan putra daerah untuk menduduki jabatan pimpinan di institusi tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki yang bersangkutan. Akibatnya, dengan keterbatasan pengalaman, wawasan maupun *skill* dan kompetensi yang bersangkutan, dapat berbenturan dengan kepentingan nasional yang lebih besar. Sebagai contoh, sering terjadi jika seorang Gubernur atau Bupati berasal dari daerah tertentu, maka para pembantu-pembantunya yang berasal satu daerah dengannya di tempatkan pada jabatan-jabatan strategis yang dapat menguntungkannya. Munculnya Etno Centris karena adanya rasa kesukuan atau kedaerahan yang berlebihan sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang kontra produktif sehingga diperlukan pengelolaaanya secara serius, sistematis dan berkesinambungan.

Adanya konflik kepentingan antara pemimpin dengan yang dipimpin maupun antar pemimpin di dalam masyarakat majemuk harus diminimalisir jika tidak dapat dihilangkan sama sekali karena akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, perlu membuat regulasi terkait dengan konflik kepentingan dan para pemimpin harus memberikan keteladanan untuk tidak memihak kepada salah satu pihak jika terjadi konflik kepentingan yang ditimbulkan akibat SARA. Untuk itu, kemitraan strategis antara para menteri yang duduk dalam pemerintahan dengan fraksi-fraksi di DPR tanpa mengedepankan kepentingan partainya menjadi sangat penting. Kemitraan strategis lintas kementerian dengan lintas fraksi-fraksi di DPR mutlak diperlukan guna meredam timbulnya konflik kepentingan yang dapat merugikan rakyat serta bangsa dan Negara.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pasca Pilkada Serentak tahun 2020 diperlukan Kepemimpinan Berbasis Multikultur untuk mengelola dan mengatur masyarakat kita yang pluralis agar tidak terjadi konflik kepentingan, konflik agama, konflik Ras dan Suku dengan mengedepankan rasa Persatuan dan Kesatuan dan Kebinekaan Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Konflik yang terjadi baik vertikal maupun horisontal Pasca Pilkada antara lain disebabkan Nir Kepemimpinan berbasis Multikultur. Oleh sebab itu, untuk memelihara Stabilitas Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan di segala bidang, diperlukan karakteristik Pemimpin berbasis Multikultur yang memiliki sifat Negarawan, Visioner, Berfikir Global bertindak Lokal dan selalu Asah, Asuh dan Asih terhadap rakyat yang dipimpinnya.
3. Pemimpin Berbasis Multikultur adalah Pemimpin yang dapat menjadi (1) *Cultural Ambasador* yaitu Pengayom

semua Golongan, Etnis, Suku, Agama dan Ras, (2) Memiliki Integritas diri (3) Mampu menjadi Solidaritas Maker (4) Sebagai Communication Leader dan (5) Mampu Meningkatkan Kualitas SDM berkesetaraan Gender.

4. Kepemimpinan Multikutur dapat dibentuk jika Pemimpin yang bersangkutan memiliki "Paradigma" berpikir Holistik Komprehensif Integral, Cerdas, Memiliki Integritas diri dan Peka terhadap perkembangan Ekonomi, Politik, Hukum, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan serta mampu Memanfaatkan Kearifan Lokal yang tumbuh di lingkungannya.

Saran

1. Hasil Pilkada Serentak 2020 diharapkan dapat menghasilkan Pemimpin Daerah di Era Normal Baru Kehidupan serta konsisten melaksanakan Protokol Kesehatan dalam menghadapi Gelombang Epidemi Covid-19 serta mampu mewujudkan dan mengkomunikasikan ide-idenya tersebut untuk dapat diimplementasikan sesuai dengan kultur dan karakteristik wilayah serta keinginan rakyat yang dipimpinnya.
2. Pemimpin Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 karena dilahirkan ditengah-tengah Pandemi Covid-19 hendaknya dapat menjadi Pemimpin perubahan dalam menghadapi Krisis Dampak Covid-19 baik sebagai 'Cultural Ambassador, Solidaritas Maker maupun Communcation Leader"
3. Pemimpin Hasil Pilkada Serentak 2020 diharapkan bijak dalam berpikir maupun bertindak menghadapi rakyat yang multi etnis, multi kultur, Umumnya kwalitas SDM rendah, Menghilangkan Ego Sektoral, Menghilangkan Primordialisme dan Etno Centris.
4. Pemimpin Berbasis Multikultur diharapkan dapat (1) Menghilangkan Primordialisme, (2) Meningkatkan Kualitas SDM rakyat yang dipimpinnya, (3) Menghilangkan Ego Sektoral, (4) Menghilangkan Etno Sentris dan (5) Mempu menjadi Pemimpin yang effektif menghadapi Perubahan

Endnotes

1. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/13/jumlah-penduduk-indonesia-diproyeksikan-mencapai-270-juta-pada-2020
2. http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020
3. https://www.cendananews.com/2019/10/peran-perempuan-bangun-sdm-tak-bisa-diabaikan. Peran Perempuan bangun SDM Unggul, Diunduh 3 Juni 2020
4. https://media.neliti.com/media/publications/24400-ID-kepemimpinan-yang-efektif-dan-perubahan-organisasi.pdf
5. https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp
6. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52295243
7. https://katadata.co.id/berita/2020/0 3/24/sri-mulyani-cegah-krisis-corona-merembet-ke-krisis-ekonomi-dan-sosial
8. https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/08/142643965/kepemimpinan-dan-komunikasi-di-masa-krisis-covid-19
9. https://www.cendananews.com/2019/10/peran-perempuan-bangun-sdm-tak-bisa-diabaikan.html
10. Ibid

DAFTAR PUSTAKA

Aryojati Ardipandito, Prayudi, Ahmad Budiman, Editor Syamsudin Haris, Tahun 2017, Dinamika Politik Pilkada Serentak, Penerbit Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,

Bappenas, Desember 2005, Grand Strategy Penyelesaian Konflik di Indonesia

Haswan Yunas, H Samijono, Zainal Arifin (Editor), Tahun 2005, Merajut Perdamaian Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Posa, Kerjasama Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan UNDP

Jeffrey M. Berry, Tahun 2013, The Interest Group Society, Tufts University, Little, Brown and Company, Boston, Toronto.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2004, Upaya dan Langkah Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Di Posa

M. Bambang Pranowo, Tahun 2010, Multidimensional Ketahanan Nasional, Jakarta, Pusata Alfabed

Samsudin Haris, Pemilu Serentak Nasional Tahun 2019, (Editor) Yogyakarta Pustaka Pelajar,

Sri Rahayu Budiarti, Muslim A.R. Effendy (Editor) Tahun 2009, Multikulturalisme Yogyakarta dan Identitas Keindonesiaan, Departemen Kebudayaan dan Parawisata, Republik Indonesia.

Sri Rahayu Budiarti, Mulim A.A, Effendy (Editor), Tahun 2009, Potret Multikulturalisme Bali, Departemen Kebudayaan dan Parawisata, Republik Indonesia

MEMBUMIKAN PANCASILA MELALUI PROSES INDOKTRINASI TERUKUR

Kolonel Tek Wajariman
Pamen Kemhan Analis Madya Bidang Matud Pusada Baranahan Kemhan
Peserta Program Reguler Angkatan 60 Lemhannas RI

Abstraksi

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang disepakati oleh founding fathers yang berdasarkan perasaan yang sama dari para pendahulu, senasib seperjuangan. Menjadi Indonesia merupakan pilihan dan telah dirasakan menyatu dan tidak ada rasa berbeda dan melihat perbedaan sebagai suatu yang menjadi bagian dari kehidupan. Perbedaan tersebut harus dapat dikelola dengan melibatkan seluruh bangsa tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan partai politik maupun dukungan terhadap kelompok maupun individu. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh warga melalui pendekatan yang bukan indoktrinasi langsung kepada masyarakat tetapi memberikan teladan sebagai pelayan masyarakat melalui mobilisasi media sosial dan digunakan untuk interaksi sosial, kenyamanan interaksi dan diskusi sosial bukannya pertentangan.

Katakunci: Pancasila, indoktrinasi, teladan, pemerintah, aparatur

Sumber: www.media.suara.com

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun dengan memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi seluruh bangsa. Kesepakatan yang dibentuk oleh *founding fathers* berdasarkan perasaan yang sama dari para pendahulu, senasib seperjuangan. Penderitaan yang sama dirasakan seluruh warga yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa dan agama. Menjadi Indonesia merupakan pilihan dan telah dirasakan menyatu dan tidak ada rasa berbeda dan melihat perbedaan sebagai suatu yang menjadi bagian dari kehidupan. Rasa menyatu tersebut karena sejak awal sepakat dan selanjutnya menjadi sebuah keluarga negara dan bangsa. Rasa persatuan harus terus dijaga agar tidak terjadi perpecahan secara fisik dari sebuah negara. Pancasila merupakan ideologi yang dijadikan panduan dalam berbangsa dan bernegara agar kesatuan tersebut tetap terjaga. Ernest Renan menyebutnya sebagai kehendak untuk bersatu[1].

Saat ini perbedaan cenderung menjadi sebuah potensi yang dapat membesar dan memecah persatuan. Dan yang paling dominan selain sosial budaya, salah satunya adalah perbedaan akibat pandangan dalam persepektif agama yang berbeda. Prof. Diana L. Eck mendefinisikannya sebagai pluralisme, sebuah proses pencarian pemahaman secara aktif menembus batas perbedaan yang bukan hanya toleransi[2]. Perbedaan tersebut harus dapat dikelola dengan melibatkan seluruh bangsa tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan partai politik maupun dukungan terhadap kelompok maupun individu. Perbedaan tersebut juga mengakibatkan nilai-nilai luhur Pancasila hilang bahkan cenderung menjadi luntur berganti menjadi pandangan baru baik agama, budaya dan interaksi sosial model baru. Perbedaan ini muncul akibat rasa tidak puas akibat dukungan dan perhatian dari aparatur negara/ pemerintah yang kurang dirasakan ditunggangi berbagai pihak yang memiliki kepentingan melalui berbagai macam media yang ada. Selain itu kemajuan teknologi di era globalisasi mendorong terciptanya pandangan dan budaya baru di luar nilai-nilai luhur yang pernah ada. Hilangnya nilai luhur ini membawa akibat perpecahan sesama warga yang dulu sebuah keluarga bangsa menjadi sesuatu yang berbeda.

Agar perbedaan dan perpecahan itu dihindari, maka nilai-nilai luhur Pancasila yang dulu merupakan perekat dalam berbangsa dan bernegara perlu dibenahi dan diperbaiki. Usaha luas telah dilakukan oleh pemerintah, namun terasa belum efektif mengingat metode yang digunakan lebih bersifat indoktrinasi dalam pembinaan dan pendidikan. Metode yang lebih tepat adalah pengabdian dan pengayoman yang lebih mengedepankan posisi sebagai pelayan masyarakat yang sesungguhnya. Selain itu media sosial digunakan secara masif dan akurat dalam membangkitkan lagi nilai-nilai persatuan melalui pemahaman budaya yang lebih mengena seperti yang diterima dan dirasakan dalam mengenal budaya asing yang selama ini dilihat. Indoktrinasi yang dilakukan adalah indoktrinasi yang terukur.

PEMBAHASAN

Dalam mengelola kecintaan tanah air dan kebangsaan melalui implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menghadapi berbagai macam hambatan. Pada prinsipnya seluruh warga negara mencintai tanah air dan tumpah darahnya, sudah tidak diragukan lagi. Namun dalam implementasi kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila tidak terwujud karena dua hal pokok yang menarik untuk diamati yaitu : sikap perilaku pemerintah/aparatur negara dan dampak globalisasi. Interaksi aparatur negara/pemerintah dengan masyarakat yang kurang mengayomi dan melayani sebagai pejabat negara, seluruh aparatur negara bertanggung jawab terhadap berlangsungnya pemerintahan dalam hal ini Tata Kelola Pemerintahan bagian dari sistem manajemen nasional. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur negara sering ditemukan pelaksanaannya tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang sesungguhnya. Sebuah program selesai dilaksanakan umumnya belum menyentuh keinginan dan kebutuhan masyarakat karena berbenturan dengan banyak hal. Permasalahan yang dihadapi antara lain *fragmented elite* yang disebabkan karena adanya kepentingan, pemahaman yang terbatas dan rendahnya penguasaan tugas dan permasalahan yang diberikan/dihadapi. Akibatnya cita-cita dan sasaran yang dilaksanakan kurang menyentuh akar rumput, yang diinginkan masyarakat. Data yang diperoleh dari data Sistem Informasi Penerimaan Laporan (SimPeL) Ombudsman RI tahun 2016 masuk 10.584 laporan dan tahun 2017 sebanyak 9.376 laporan[3]. Laporan ini menunjukkan ketidak puasan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Secara Data Sistem Informasi Penerimaan Laporan (SimPeL) Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan, dalam dua tahun terakhir jumlah laporan masyarakat sangat tinggi. Ketidak puasan ini salah satu contoh yang selanjutnya dimanfaatkan untuk memecah belah persatuan dan perlawanan terhadap pemerintah.

Dampak Globalisasi dan kemajuan teknologi membuat informasi yang diterima saling tumpang tindih antara kepentingan kelompok maupun golongan dengan kepentingan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Pemahaman terhadap informasi yang diterima melalui media membuat masyarakat mudah terbawa arus menuju hal-hal yang kontra produktif dan cenderung memecah belah persatuan. Melalui media juga mengantarkan masyarakat mengalami pergeseran budaya yang nyaris melupakan budaya lokal. Pergeseran budaya ini berdampak negatif terhadap cara pandang baru dalam melihat perbedaan yang justru ada sejak dulu dan merupakan bagian dari budaya lokal. Dalam tulisan Kemenkominfo disebutkan bahwa Pemerintah menginginkan media sosial dimanfaatkan untuk hal yang produktif, mendorong kreativitas dan inovasi dan peningkatan kesejahteraan.[4]

Dalam menyelesaikan masalah tersebut di atas beberapa langkah sederhana namun masif dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan dan penataan kembali dalam struktur

dan pengelolaan aparatur negara/ pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Implementasi Pancasila yang diberikan kepada aparatur negara melalui regulasi, aturan dan petunjuk serta panduan agar tugas yang diberikan sesuai dengan cita-cita nasional. Cita-cita nasional yang tercipta berdasarkan kemauan bersama yang disepakati dan saat ini sebagai penerus wajib mewujudkannya, bukan hanya sekedar simbol pelaksanaan saja. Tulang punggung perwujudan cita-cita dalam sistem manajemen nasional adalah Tata Laksana Pemerintahan dalam hal ini Pemerintah beserta aparat yang bekerja di dalamnya. Ir. Sukarno dalam sambutannya pada pemberian gelar doktor Honoris Causa dari sebagai penggali Pancasila oleh Universitas Gajah mada tanggal 19 September 1951 mengatakan "Tiada perbuatan *zonder* kemauan, tiada kemauan *zonder wil*"[5]. Kemauan dan perbuatan dilakukan oleh pemimpin dimanapun posisi dan kedudukannya. Perbuatan dan kemauan tersebut tidak hanya dari yang bersangkutan tetapi juga diarahkan dalam bentuk regulasi, aturan, petunjuk yang dijadikan bimbingan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara. "Bimbingan" tersebut harus dapat menjamin tidak mengantarkan aparatur yang efek pelaksanaan ke arah *fragmented elite* serta perpecahan di masyarakat. Perlu konsultasi dan kontrol yang bertanggung jawab sehingga apa yang dilakukan dan dilaksanakan dapat membangun bangsa sesuai cita-cita nasional tanpa menempatkan cita-cita kelompok atau golongan yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan. "Bimbingan" tersebut dibuat terstruktur mulai dari tahapan seleksi calon aparatur negara tersebut sampai dengan pelaksanaan dan pembinaan yang berjenjang dan berlanjut. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak hanya membuat bimbingan pengamalan Pancasila saja tetapi berkoordinasi dengan semua Kementrian dan Lembaga dalam menyiapkan aturan/regulasi, petunjuk, bimbingan dan pelatihan aparatur negara yang bertanggung jawab dan profesional serta inheren, sejiwa dengan nilai-nilai Pancasila. Aparatur Negara harus dapat melaksanakan tugas diamanatkan sebagai pelayan masyarakat bukan birokrat yang selalu menuntut penghargaan dan penghormatan yang tidak diperlukan.

b. Memajukan kebudayaan menjadi bagian dari jiwa dalam berbangsa dan bernegara, budaya yang *inherent* dalam jiwa dan raga. Dalam perwujudannya diperlukan aktor strategis dalam mengimplementasikan budaya secara masif tanpa harus dipaksa. Budayawan dapat mengajak seluruh rakyat untuk menikmati dan merasakannya. Kebudayaan nasional tersebut diambil dari berbagai suku bangsa di tanah air dan diperkenalkan sebagai sesuatu yang dapat dinikmati dan dirasakan manfaatnya dalam membangun rasa cinta tanah air dan kebersamaan. Sikap Gotong Royong dalam Ekasila sebagai rangkuman Pancasila kembali diperkenalkan dan dilaksanakan penuh kesadaran melalui pengenalan kembali budaya bangsa. Perlu dibangun dan dibentuk tim yang kuat yang menguasai budaya berbagai macam suku, bekerjasama dengan warga yang sangat menguasai dan pakar dalam hal mengkreasikan seni dan teknologi yang disajikan dalam media.

c. Penyampaian Pancasila sebagai dasar negara dan paradigma bangsa melalui sosialisasi masal bukan simbolis dan indoktrinasi, literasi Pancasila diperkenalkan bukan hanya secara utuh diperkenalkan namun dinikmati dan dipahami sebagai sesuatu yang menyenangkan dan terasa manfaatnya. Indoktrinasi dapat disampaikan secara resmi dengan memberikan batasan yang jelas bukan *top up - bottom*

yang menghasilkan tanggapan nyinyir dan bahkan berujung perpecahan. Pemanfaatan media sosial betul-betul terjaga kualitas dan diteruskan manfaatnya secara tidak sadar tanpa paksaan oleh seluruh warga. Sebagai contoh respon pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid 19 yang menginformasikan secara masif tentang perkembangan penanganannya, respon seluruh aparatur negara dalam mengatasi permasalahan seperti pelayanan kesehatan, pemberantasan penjualan masker ilegal, pembersihan wilayah yang tercemar dan seterusnya. Informasi masif juga diberikan dalam hal bagaimana menjaga kesehatan, membantu dan mengkomunikasikan permasalahan melalui sistem komunikasi yang direspon cepat dan segera. Apabila satu masalah Covid 19 direspon secara masif dan terlihat bagaimana melayani, saling membantu sesama warga dan seterusnya akan berdampak pada pemahaman terhadap penerapan sila-sila Pancasila bukan melalui indoktrinasi tetapi langkah nyata. Tindakan dan respon yang segera dan besar/masif ini tentu akan menjadi perhatian dan menimbulkan kesadaran. Setiap kesalahan yang terjadi direspon dengan baik dan ditanggulangi segera, rakyat akan memahami permasalahan keterbatasan dan hambatan yang dimiliki. Pengguna media juga tidak perlu didorong dan dibiarkan untuk memanfaatkan media yang ada digunakan untuk menciptakan suasana yang justru kontra produktif dan memecah belah. Sudah bukan masanya lagi mengatakan perbedaan pandangan sebagai lawan yang pantas untuk terus dipojokkan dan dijatuhkan. Penggunaan citra buruk lawan politik tidak masanya lagi karena akan terbawa sepanjang waktu, meskipun masa kampanye telah berakhir. Hal ini akan berdampak pada perpecahan apabila kebiasaan dan kebudayaan baru ini dibiarkan. Menghina dan mengatakan keburukan orang lain bukan contoh budaya baik di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan.

Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh warga melalui pendekatan yang bukan indoktrinasi langsung kepada masyarakat tetapi memberikan teladan sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan memberikan bantuan dan respon yang dirasakan seluruh rakyat meskipun keterbatasan dimiliki pemerintah. Respon itu juga diikuti dengan pemanfaatan seluruh media secara masif mengedukasi warga nilai—nilai Pancasila bukan dengan menyebutkan sila-silanya tetapi menunjukkan sikap dan perilaku yang menjadi bagian dari nilai-nilai tersebut. Dan budaya kembali diperkenalkan dengan metode yang lebih komunikatif dan terasa pemahaman serta kecintaannya. Dengan muncul kecintaan tersebut berdampak pada semakin saling mengerti berbagai perbedaan dan keanekaragaman budaya di seluruh tanah air.

Saran.

Upaya membumikan nilai-nilai Pancasila adalah dengan mobilisasi media sosial dan digunakan untuk interaksi sosial, kenyamanan interaksi dan diskusi sosial bukan pertentangan. Globalisasi sangat dominan dalam pemahaman dan pandangan, namun perlu juga diperkenalkan konsep glokalisasi. Glokalisasi yang merupakan investasi lokal di era global berupa budaya, spirit dan kearifan lokal.

Endnotes

1 Tim Pokja Bahan Ajar SBS Pancasila, "*Empat Konsensus Dasar Bangsa Sub Bidang Studi Pancasila*", Lemhannas, 2020, hal. 20.

2 Aris Kristianto, "*Pluralisme Agama di Indonesia*" DISERTASI Gelar Doktor dalam Program Studi Dirasah Islamiyah pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, hal.66.

3 https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--asn-tanpa-ideologi-pancasila ; diunduh pada 3 September 2020 pukul 20.00 WIB.

4 www.kominfo.go.id , Sorotan Media pada 3 Januari 2017, diunduh pada 9 Maret 2020 pukul 20.30 wib.

5 Ir. Sukarno, "*Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*", Cetakan Keempat 2019 Media Pressindo, Yogyakarta, hal. 34

DAFTAR PUSTAKA

1. Tim Pokja Bahan Ajar SBS Pancasila, "*Empat Konsensus Dasar Bangsa Sub Bidang Studi Pancasila*", Lemhannas, 2020.
2. Aris Kristianto, "*Pluralisme Agama di Indonesia*" DISERTASI Gelar Doktor dalam Program Studi Dirasah Islamiyah pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya 2018.
3. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--asn-tanpa-ideologi-pancasila ; diunduh pada 3 September 2020.
4. www.kominfo.go.id , Sorotan Media pada 3 Januari 2017, diunduh pada 9 Maret 2020.
5. Ir. Sukarno, "*Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*", Cetakan Keempat 2019 Media Pressindo, Yogyakarta.

DAMPAK TUMPANG TINDIH PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Marsma Arif Widianto, S.A.B,M.Tr (Han)
Staf Khusus Kasau
Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 60 Lemhannas RI

Abstraksi

Keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan sistem administrasi negara Indonesia, tidak hanya atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai "aturan simbolis", tetapi juga berdasar atas desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Selama ini masih memunculkan adanya konflik dan krisis diantara tingkatan pemerintahan, institusi perwakilan masyarakat maupun dengan masyarakat itu sendiri mengatasi konflik-konflik tersebut, maka perlu diupayakan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ekses negatif terdapat konflik yang berakar pada tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan. mencegah terjadinya disharmoni peraturan dan perundang-undangan daerah dan pusat maka perlu adanya langkah langkah Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan. Sangat penting adanya perbaikan pola komunikasi bagi masing-masing pihak, bersinergi dan selalu berkoordinasi agar terwujud hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harmonis.

Kata kunci: disharmoni, peraturan, perundangan, otonomi daerah

Sumber: www.merdeka.com

PENDAHULUAN

Bedasarkan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa, tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersatu, berdaulat dalam kehidupan berbangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan nasional dan pergaulan Internasional bersahabat dan damai. Tujuan Pembangunan Nasional dimaksud melandasi dan menentukan kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan wilayah serta daerah di Indonesia secara struktural. Pembangunan wilayah dan daerah dilaksanakan dengan secara bersama-sama, serasi dan terpadu dengan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan stabilitas Ipoleksosbudhankam. Pemerintahan Indonesia mengenal sistem desentralisasi, dimana sistem desentralisasi merupakan suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonomi yang mejamintetaptegak nya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah Otonom sebagai sub sistem dari NKRI mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Diberikannya kewenangan kepada daerah melalui kebijakan desentralisasi merupakan upaya memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat serta sekaligus menyempurnakan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang selama ini cenderung berbau sentralistik disempurnakan menjadi penyelenggaraan pemerintah daerah yang berasaskan desentralisasi.

Penyelenggaraan sistem desentralisasi dalam organisasi pemerintahan Negara Indonesia telah menjadi consensus nasional. Dalam setiap peraturan perundangan/ konstitusi yang pernah berlaku terdapat ketentuan yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Berbagai peraturan dan perundang-undangan telah diterbitkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan desentralisasi. Sesuai

dengan konsensus nasional tentang keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan sistim administrasi negara Indonesia, tidak hanya atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai "aturan simbolis", tetapi juga berdasar atas desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Perkembangan sistim pemerintahan dengan adanya reformasi pemerintahan daerah sebagai perubahan yang direncanakan *(planned change)* atau perubahan yang dikehendaki *(intended change)*, selama ini masih memunculkan adanya konflik dan krisis diantara tingkatan pemerintahan, institusi perwakilan masyarakat maupun dengan masyarakat itu sendiri. Konflik yang terjadi bervariasi diantaranya: konflik antara Pemerintahan dan daerah otonom, konflik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, konflik antar Kabupaten/Kota, konflik antara Kepala Daerah dan DPRD dan konflik antara masyarakat dengan DPRD/Kepala Daerah.

Untuk mengatasi konflik-konflik tersebut, maka perlu diupayakan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ekses negative terdapat konflik yang berakar pada tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan. Bebera paperaturan dan perundang-undangan yang tumpang tindih diantaranya adalah Undang-Undang Kepegawaian yang tumpang tindih dengan Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Sebagai contoh yaitu adanya ketentuan tentang Pembina kepegawaian daerah. Hal ini bias terlihat didalam Undang-Undang Pemeritah Daerah yang menegaskan bahwa Pembina kepegawaian daerah adalah sekretaris daerah (Sekda), namun dalam Undang-Undang Kepegawaian disebutkan bahwa Pembina kepegawaian adalah Kepala Daerah. Beberapa contoh lainnya adalah Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana menyatakan bahwa perencanaan daerah itu cukup dengan peraturan Gubernur, sedangkan dalam Undang-Undang No 32/2004 menyatakan bahwa perencanaan daerah harus dengan Peraturan Daerah (Perda).[1]

PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terjadi banyak bias kewenangan, sehingga perlu memaknakan hubungan hirarki antara pemerintah pusat dan daerah. Tejadinya tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi isu yang selalu diangkat dalam setiap kesempatan pembicaraan.

Hal tersebut pada dasarnya telah disadari oleh aparatur penyelenggara negara, namun apabila dikaitkan usaha untuk mengantisipasinya tidak pernah tuntas. Beberapa daerah dalam merencanakan, menyusun dan membuat peraturan dan perundang-undangan (hak menetapkan perundangan dalam rangka otonomi daerah diatur dalam pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945) dalam rangka kepentingan pembangunan di waliyahnya masih ada yang tidak berpedoman pada stratifikasi perundangan yang diatur pemerintah pusat dan ditetapkan dalam Undang-Undang No 10/2004. Adapun stratifikasi perundangan yang diatur tersebut adalah :

1. UUD 45
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Peraturan Daerah (Perda)

Hal diatas menunjukkan bahwa kesinambungan dalam perencanaan, penyusunan dan pembuatan serta pengesahan peraturan perundangan

daerah tidak boleh bertentangan dengan perundan-undangan diatasnya berdasar stratifikasi Undang-undang. Apabila terjadi tumpang tindih perundangan atau terjadi pertentangan isi perundangan daerah dengan pusat akan berdampak munculnya disharmonis antara daerah dan pusat, lebih lanjut lagi program pembangunan pusat bisa terkendala.Terjadinya tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut diantaranya disebabkan karena[2]:

1. Masih adanya semangat ego sektoral dari masing-masing instansi terkait, hal ini bias saja terjadi karena masih adanya perbedaan persepsi tentang perundang-undangan sebagai suatu sistem, sehingga apa yang dibahas oleh wakil-wakil dari instansi terkait tidak bersifat menyeluruh, namun hanya bersifat fragmentaris berdasar kepentingan masing-masing instansi.
2. Pejabat yang memiliki kewenangan membuat peraturan dan perundang-undangan yang berganti-ganti, hal ini baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian bedasar karena berbagai pertimbangan.
3. Masih adanya kelemahan koordinasi dalam proses pembuatan peraturan danperundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum.

Tentunya hal diatas apabila tidak segera dicegah akan menyebabkan timbulnya permasalahan pusat dan daerah. Adapun teori yang mendasari upaya untuk mengatasinya yaitu dengan : Teori Hukum Integratif oleh Romli Atma saminta[3], teori ini memberikan keyakinan bahwa fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik di dalamlingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maupun didalam lingkup perkembangan internasional.

Gunamencegah terjadinya Disharmoni peraturan dan perundang-undangan daerah dan pusat maka perlu adanya langkah langkah Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan. Sesuai dengan yang ada didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), pengertian harmonis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atauseiasekata, sedangkan pengertian harmonisasi adalah pengharmonisan, atau upaya untuk mencari keselarasan. Terkait dengan hal ini, kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian/keselarasan antara peraturan dan perundang-undangan agar tidak terjadi duplikasi pengaturan. Adapun langkah-langkah Harmonisasi adalah sebagai berikut :

1. Pasal yang mengalami atau yang menyebabkan timbulnya disharmoni segera diubah atau dicabut dan apabila diperlukan merubah seluruh pasal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan, hal ini dilaksanakan oleh lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk merubah atau mencabutnya.
2. Perlunya pegajuan permohonan uji materil ditujukan kepada lembaga yudikatif, yaitu :
   a. Pengujian undang-undang dihadapkan kepada Undang-Undang Dasar ditujukan kepada Mahkamah konstitusi.
   b. Adapun untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ditujukan kepada Mahkamah Agung.

Adanya ketidakharmonisan yang menjadikan permasalahan serius hubungan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masih belum cukup apabila hanya diselesaikan dengan melalui perbaikan Undang-Undang Pemerintah Daerah, namun sangat diperlukan adanya keputusan politik (*political will*) dan komitmen politik (*political commitment*) dari pada para pemimpin pemegang otonomi daerah undang-Undang Pemerintah daerah, terutama terkait pembinaan dan pengawasan dan penguatan Gubenur wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Disatu sisi sebaliknya, pemerintah daerah tidak perlu antipati / *resisten* berlebihan dalam merespon kebijakan pemeritah pusat yang dianggap tidak sesuai dengan atau sejalan dengan keiginan daerah atau bahkan dianggap merugikan. Oleh Karena itu, sangat penting adanya perbaikan pola komunikasi bagi masing-masing pihak, bersinergi dan selalu berkoordinasi agar terwujud hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harmonis.

PENUTUP

Kesimpulan.

Adanya tumpang tindih peraturan dan perundang-undangan antara pemerintah pusat dan daerah diera otonom daerah ini, tentunya dapat di cegah dan diatasi dengan melaksanakan Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan oleh pemerintah pusat dan tentunya melibatkan instansi terkait dan daerah yang menjadi objek. Adanya Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan akan menjadikan hubungan Pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi dalam melaksanakan program pembangunan yang diprogramkan oleh Pemeritah pusat, dan stratifikasi perundang-undangan dapat dijalankan dengan baik sesuai amanat Undang- Undang.

Saran

Adapun saran yang diberikan dalam rangka mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Harmonisasi peraturan dan perundang-undangan adalah :

1. DPRD tingkat I dalam merencanakan penyusunan peraturan dan perundang-undangan di daerahnya harus selalu mengacu pada perundang-undangan yang disusun pemerintah pusat, begitu pula DPRD tingkat II mengacu pada perundangan yg telah disusun oleh Pemda tingkat I, sehingga pasca diputuskan.
2. Antar level pemerintah daerah khususnya Pemda baik tingkat I dan tingkat II saling menghilangkan ego sektoral dalam berkoordinasi untuk menyusun ataupun membuat perundang-undangan yang saling berkaitan.

Endnotes:

1. SI Jrnalis,Kemendari temukan11Undang-Undang Tumpang Tndih,2010, disadurdarihttps://news.okezone.com/read/2010/07/29/339/357622/kemendagri-temukan-11-uu-tumpang-tindih,padapk 18.35,14 Maret 2020
2. Media KomunkasiKemenkumhan, HarmonisasiPeraturanpperundang-undangan,disadurdarihttp://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html pk 06.52 12 Maret 2020
3. Damang Averroes Al-Khawarizmi,MenguraiSepintas “Hukumintegratif” RomliAtmasasmita, 2012,disadurdarihttps://www.negarahukum.com/hukum/mengurai-sepintas-hukum-integratif-romli-atmasasmita.html,padapk 07.50tgl 15 Maret 2020

DAFTAR PUSTAKA

Damang Averroes Al-Khawarizmi, Mengurai Sepintas “Hukum integratif” Romli Atmasasmita, 2012,disadur dari https://www.negarahukum.com/hukum/mengurai-sepintas-hukum-integratif-romli-atmasasmita.html,pada pk 07.50 tgl 15 Maret 2020

Media Komunkasi Kemenkumhan, Harmonisasi Peraturan pperundang-undangan,disadur dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html pk 06.52 12 Maret 2020

SI Jurnalis,Kemendari temukan11Undang-Undang Tumpang Tndih,2010, disadur dari https://news.okezone.com/read/2010/07/29/339/357622/kemendagri-temukan-11-uu-tumpang-tindih,pada pk 18.35,14 Maret 2020.

Segiyono,Pentingnya Harmonsasi Pembentukan eraturan Perundang-Undangan,2015, disadur dari https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Soegiyono_Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf

Suhajar Diantoro, Tumpang Tindih Kewenangan Merupakan Kendala Utama Otonomi Daerah, 2016 disadur dari https://riau.antaranews.com/berita/79086/suhajar-diantoro-tumpang-tindih-kewenangan-merupakan-kendala-utama-otonomi-daerah 14 Maret 2020 pk 11.49

OPTIMALISASI PERAN PEMIMPIN NASIONAL UNTUK MEMPERCEPAT PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Kolonel Pnb Fakhrizet, S.Sos.
Pamen Sopsau
Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 60 Lemhannas RI

Abstraksi

Berkaitan dengan kepemimpinan, permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana dapat meningkatkan komitmen Pemimpin Nasional dalam mencapai tujuan nasional sesuai amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terus menjadi program dari setiap rezim pemerintahan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran pemimpin nasional untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah UUD NRI 1945 salah satunya melalui percepatan penurunan angka kemiskinan, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai. Pemimpin nasional dinilai berhasil apabila dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan termasuk kemiskinan. Pemimpin nasional yang visioner, memiliki integritas moral dan etika kepemimpinan tinggi, dan kebijakan yang pro-rakyat akan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci : kepemimpinan, visioner, kemiskinan, optimalisasi

Sumber: www.inews.id

PENDAHULUAN

Kepemimpinan berarti kemampuan mempengaruhi, memotivasi, mengajak, dan mengarahkan orang lain kepada suatu tujuan yang telah ditentukan, selain itu juga merupakan suatu relasi antara pemimpin dan orang atau organisasi yang dipimpin[1]. Kepemimpinan berhubungan erat dengan gaya kepemimpinan yang menentukan kualitas interaksi dinamis antara pemimpin dengan masyarakat[2]. Seorang pemimpin harus memiliki komitmen dalam menjalankan organisasinya. Komitmen merupakan integritas disiplin dalam diri seseorang pemimpin yang konsisten dengan apa yang sudah disepakati dalam kehidupannya baik dalam lingkungan sosial, organisasi, dan lingkungan keluarga[3]. Berkaitan dengan kepemimpinan, permasalahan yang terjadi saat ini adalah bagaimana dapat meningkatkan komitmen Pemimpin Nasional dalam mencapai tujuan nasional sesuai amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Di Indonesia, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia terus menjadi program dari setiap rezim pemerintahan, yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Survey LSI untuk kepemimpinan yang diharapkan masyarakat menunjukkan bahwa 80,7% menginginkan pertumbuhan ekonomi, 75,5% mendambakan pemerintahan yang bersih dan 67,5% menginginkan pemerintah yang menjalankan hak asasi manusia (HAM)[4]. Salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang dari bulan September 2018 dan menurun 0,80 juta orang dari bulan Maret 2018. Secara umum, pada periode tahun 2005 sampai bulan Maret 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, pengecualian pada periode tertentu yaitu pada bulan Maret 2006, September 2013, dan Maret 2015[5]. Berdasarkan data ini, angka kemiskinan secara bertahap mengalami penurunan

walaupun sempat beberapa kali naik pada periode tertentu. Meskipun demikian, kesenjangan orang kaya dengan orang miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan cenderung meningkat.

Bangsa Indonesia membutuhkan sistem kepemimpinan nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional dilandasi nilai-nilai falsafah Pancasila[6]. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran pemimpin nasional untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah UUD NRI Tahun 1945 salah satunya melalui percepatan penurunan angka kemiskinan, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai.

PEMBAHASAN

Masalah kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah bangsa Indonesia dalam setiap rezim pemerintahan. Dampak kemiskinan antara lain kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya akses terhadap pelayanan publik, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, dan semakin bertambahnya arus urbanisasi ke kota.

Berdasarkan data, pada awal reformasi tahun 1999-2004, angka kemiskinan telah berhasil diturunkan sebesar 6,8%, pada masa pemerintahan Presiden SBY tahun 2004 sampai 2014 kemiskinan turun sebesar 5,7%. Kemudian pada pemerintahan Presiden Jokowi selama satu periode hanya berhasil menurunkan kemiskinan 1 persenan saja, tepatnya pada tahun 2018, persentase kemiskinan turun menjadi 9,82% dari tahun awal berkuasa 10,96%[7].

Penyebab kemiskinan disamping karena kemalasan dalam berusaha mencari rezeki atau bekerja, tetapi juga dapat dipicu karena kesalahan pemimpin dalam suatu pemerintahan. Seorang pemimpin yang seharusnya menjadi pengayom rakyat, tetapi justru mengkhianati kepercayaan rakyat dan semua amanat yang diembannya. Perilaku pemimpin yang menyebabkan timbulnya kemiskinan karena pemimpin tidak berpihak kepada rakyat, dalam hal ini para pemimpin yang membuat regulasi hanya menguntungkan sekelompok atau golongan tertentu. Sebagai akibatnya, muncul adanya ketimpangan sosial.

Melihat data dan fakta terkait kemiskinan tersebut, maka diperlukan pemimpin nasional yang mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dan dapat menurunkan angka kemiskinan dengan cepat. Berkaitan dengan pemimpin nasional, pokok-pokok persoalannya antara lain adalah:

1. Kurang visioner. Pemimpin yang visioner harus memiliki visi yang jelas dan terfokus. Kredibilitas pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengembangkan inovasi dan merumuskan langkah-langkah pengembangan suatu organisasi, tetapi yang terpenting adalah kemampuan pemimpin menghadapi situasi krisis dan membawa solusi dari berbagai permasalahan. Bukti dari pemimpin yang kurang visioner antara lain banyaknya oknum yang sibuk memperkaya diri dengan korupsi sehingga berdampak kesejahteraan rakyat semakin jauh dari harapan. Catatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) bahwa kasus korupsi di sector anggaran desa menjadi kasus korupsi terbanyak selama tahun 2019, dengan total 46 kasus dari 271 kasus korupsi dan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 32.3 miliar[8]. Selain itu, sebanyak 213 ASN menjadi

tersangka korupsi tahun 2019.

2. Kurangnya integritas, moral dan etika kepemimpinan. Menurut Brillantes dan Fernandez (2011) dalam Linda dkk. (2013) banyak faktor yang menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap pemimpin, diantaranya adalah kurangnya jiwa kepemimpinan, kurangnya kompetensi, serta kurangnya integritas pada diri pemimpin[9]. Integritas diidentikkan sebagai kejujuran dan kebenaran dari setiap tindakan seseorang[10], oleh karena itu dalam mengemban amanah seorang pemimpin nasional harus memahami dan melaksanakan Sembilan nilai integritas yang terbagi dalam nilai inti (jujur, disiplin, tanggung jawab), nilai etos kerja (mandiri, kerjakeras, sederhana), dan nilaisikap (berani, adil, peduli)[11].

3. Kebijakan yang tidak pro-rakyat. Program yang dijalankan oleh pemimpin seringkali tidak selaras dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat, beberapa program salah sasaran baik dalam pilihan kegiatan maupun kelompok masyarakat penerima manfaat. Seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 bahwa ada sekitar 40% bantuan yang salah sasaran yang disebabkan kesulitan melakukan pendataan karena persoalan dana[12]. Contoh lainnya pada tahun 2020 ini, adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan sampai 100% per 1 Januari 2020 untuk pemegang BPJS Kesehatan kategori bukan penerima upah dan bukan pekerja pada ketiga kelas layanan, yang telah disahkan dengan Perpres RI nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres RI nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kenaikan iuran BPJS yang tinggi tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan. Kebijakan lainnya adalah penghapusan subsidi pelanggan listrik rumah tangga mampu 900VA[13]. Kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan semakin membebani rakyat.

Berdasarkan pokok persoalan tersebut, maka perlu diberikan solusi berkaitan dengan pemimpin nasional untuk dapat mengoptimalkan perannya dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pemimpin yang lebih visioner. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran Kemendagri, Kemendikbud dan Pemda dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada pemimpin tentang pentingnya penerapan visi dan misi yang akan dipakai untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menjalankan visi dan misi tersebut, perlu adanya pengawasan dari BPK, BPKP dan KPK terutama untuk hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan aset publik agar tidak disalah gunakan.Pemerintah dan BKN perlu memperkuat kode etik dan mempertegas sanksi untuk ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.

2. Meningkatkan integritas, moral dan etika kepemimpinan. Dalam hal ini diperlukan peran Kemendagri dan Kemendikbud untuk memberikan pendidikan dan pelatihan nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan, budaya politik dan pembinaan mental pemimpin. KPK, BPIP dan Pemda menanamkan Sembilan nilai integritas untuk setiap pemimpin nasional agar terhindar dari korupsi. Kemenpan RB dan BKN menerapkan sistem seleksi

ketat dalam perekrutan dan seleksi calon pemimpin nasional berbasis kompetensi dengan integritas dan komitmen sebagai kompetensi inti. Lemhannas RI dan DPR menetapkan aturan tentang Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) pada setiap organisasi dan proses pemilihan pemimpin.

3. Menjalankan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan rakyat. Pemerintah melalui Kemenko PMK, Kemenkum HAM, Kemenlu, Kemenakertrans, Kemendes PDTT, Kemendagri, Pemda dan instansi terkait lainnya mengadopsi program-program pengentasan kemiskinan dari negara lain yang berhasil untuk diterapkan di Indonesia, misalnya menjalankan skenario revolusioner yang dilakukan dengan memberikan berbagai sumber daya dan kemudahan akses kepada rakyat miskin, seperti gas gratis untuk rumah tangga, membatasi tenaga kerja asing, menciptakan lapangan kerja baru di setiap daerah, merevisi kebijakan-kebijakan yang membebani rakyat dan memberikan bantuan operasional khususnya untuk pedesaan tentunya dengan dilakukan pengawasan.

Berdasarkan analisis Teori Lingkungan yang mengemukakan bahwa munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan (Stogdill, 1974: 18)[14].Setiap situasi dan kondisi tertentu akan menuntut kualitas dari seorang pemimpin yang berbeda. Pemimpin nasional dinilai berhasil apabila dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada, dalam bahasan ini adalah kemiskinan. Pemimpin nasional yang visioner, memiliki integritas moral dan etika kepemimpinan tinggi, dan kebijakan yang pro-rakyat akan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah bangsa Indonesia dalam setiap rezim pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran pemimpin nasional untuk dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amanah UUD NRI Tahun 1945 salah satunya melalui percepatan penurunan angka kemiskinan, sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mengoptimalkan peran peran pemimpin nasional untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas pemimpin yang lebih visioner, meningkatkan integritas, moral dan etika kepemimpinan serta menjalankan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan rakyat.

Saran

Beberapa saran sebagai upaya riil yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Para pemimpin di tingkat pusat dan daerah perlu meningkatkan kepekaan dan kepedulian dalam melihat daerah yang dipimpinnya, sehingga aspirasi rakyat dan apapun yang dibutuhkan oleh rakyat dapat terpenuhi.
2. Pemerintah mengoptimalkan pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan *stake holder* terkait. Selain itu juga mengoptimalkan keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah, tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Parpol melakukan seleksi kualitas calon pemimpin nasional secara ketat dengan melibatkan akademisi dan kementerian terkait. Dalam hal ini rekam jejak pengalaman sangat penting tidak hanya pengalaman teoritis atau gelar akademis yang dimiliki, tetapi juga yang sangat penting memiliki pengalaman empirik menajerial memadai.

Endnotes:

1. Sunarta. 2006. *Kepemimpinan Visioner dalam Kancah Global.* Jurnal Manajemen Pendidikan No. 02/Th II/ Oktober/2006
2. https://mediaindonesia.com/read/detail/140502-gaya-kepemimpinan-yang-didambakan-rakyatDiaksestgl 17 April 2020 pukul09:15WIB
3. KerangkaAcuanEsaiPeserta PPRA LX Lemhannas RI 2020 BidangStudiKepemimpinan
4. https://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-kepemimpinan-2019-yang-diinginkan-masyarakat-seperti-apaDiaksestgl 17 April 2020 pukul09:21WIB
5. Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019.* Berita Resmi Statistik No. 56/07/Th. XXII, 15 Juli 2019
6. Iwan Nugroho. 2013. *Mengembangkan Moral dan Akuntabilitas Kepemimpinan Nasional guna Mendukung Pembangunan Nasional.* Dalam Buku Enam Windu Lemhannas RI: Merajut Nusantara Hal 205-245. Jakarta : PT Yellow Multi Media
7. https://rmol.id/read/2020/03/14/425294/kemiskinan-dan-solusinya-dalam-kepemimpinan-jokowiDiaksestgl 17 April 2020 pukul10:16WIB
8. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019Diaksestgl 18 April 2020 pukul09:37WIB
9. Linda Aryani dkk. 2013. *Kompetensi Tidak Sempurna Tanpa Integritas Pada Pemimpin.* Jurnal Psikologi Volume 9 Nomor 1, Juni 2013
10. H. Darmakusuma, Dr., M.Si. 2020. *Peran Pemimpin Nasional DalamMembangun Modal Sosial Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Wadah NKRI.*Disampaikan pada Diskusi Panel Peserta PPRA LX Lemhannas RI tgl7 April 2020
11. KPK RI. 2016. *Modul Materi "Integritas Untuk Umum".* Jakarta : Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KedeputianBidangPencegahan KPK
12. https://mediaindonesia.com/read/detail/264825-40-bantuan-untuk-warga-miskin-di-jateng-salah-sasaranDiaksestgl 17 April 2020 pukul11:35 WIB
13. https://wartaniaga.com/2019/11/tahun-2020-banyak-kebijakan-pemerintah-yang-tidak-pro-rakyat/Diaksestgl 18 April 2020 pukul09:49WIB
14. Tim PokjaKepemimpinan. 2020. *Bahan Ajar Kepemimpinan.* Jakarta : Lemhannas RI

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019.* Berita Resmi StatistikNo. 56/07/Th. XXII, 15 Juli 2019

H. Darmakusuma, Dr., M.Si. 2020. *Peran Pemimpin Nasional Dalam Membangun Modal Sosial Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam Wadah*

NKRI. Disampaikan pada Diskusi Panel Peserta PPRA LX Lemhannas RI tgl 7 April 2020

Iwan Nugroho. 2013. *Mengembangkan Moral dan Akuntabilitas Kepemimpinan Nasional guna Mendukung Pembangunan Nasional*. Dalam Buku Enam Windu Lemhannas RI: Merajut Nusantara Hal 205-245. Jakarta : PT Yellow Multi Media

Kerangka Acuan Esai Peserta PPRA LX Lemhannas RI 2020 Bidang Studi Kepemimpinan

KPK RI. 2016. *Modul Materi "Integritas Untuk Umum"*. Jakarta :Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK

Linda Aryani dkk. 2013. *Kompetensi Tidak Sempurna Tanpa Integritas Pada Pemimpin*. Jurnal Psikologi Volume 9 Nomor 1, Juni 2013

Sunarta. 2006. *Kepemimpinan Visioner dalam Kancah Global*. Jurnal Manajemen Pendidikan No. 02/Th II/ Oktober/2006

Tim Pokja Kepemimpinan. 2020. *Bahan Ajar Kepemimpinan*. Jakarta : Lemhannas RI

https://mediaindonesia.com/read/detail/140502-gaya-kepemimpinan-yang-didambakan-rakyat Diakses tgl 17 April 2020 pukul 09:15 WIB

https://nasional.kontan.co.id/news/kriteria-kepemimpinan-2019-yang-diinginkan-masyarakat-seperti-apa Diakses tgl 17 April 2020 pukul 09:21 WIB

https://wartaniaga.com/2019/11/tahun-2020-banyak-kebijakan-pemerintah-yang-tidak-pro-rakyat/ Diakses tgl 18 April 2020 pukul 09:49 WIB

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019 Diakses tgl 18 April 2020 pukul 09:37 WIB

https://mediaindonesia.com/read/detail/264825-40-bantuan-untuk-warga-miskin-di-jateng-salah-sasaran Diakses tgl 17 April 2020 pukul 11:35 WIB

https://rmol.id/read/2020/03/14/425294/kemiskinan-dan-solusinya-dalam-kepemimpinan-jokowi Diakses tgl 17 April 2020 pukul 11:46 WIB

OPTIMALISASI PENDIDIKAN NASIONAL GUNA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kombes Pol Drs. Zarialdi, S.H., M.H.

Kasubdit Jian Geo dan Wasantara Ditjian Hankam dan Geografi

Debidjianstrat Lemhannas RI

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 60 Lemhannas RI

Abstraksi

Untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta mencpai Tujuan nasional serta harus mengembangkan manusia Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas agar tidak tertinggal dari Negara lain. Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang dapat diukur dari kemajuan kualitas pendidikannya. Meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa tampaknya sangat tergantung kepada kemampuan pendidikan, hal ini ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan dukungan sarana-prasarana pendidikan yang baik

Kata kunci : pendidikan nasional, sumber daya manusia, optimalisasi

Sumber: www.suarakebebasan.id

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara dan bangsa, Indonesia merupakan negara dengan posisi geopolitik yang sangat spesifik dan strategis, sehingga memerlukan suatu pemahaman tentang konsepsi bangsa mengenai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menggunakan konsepsi Wawasan Nusantara yang menganut filosofi dasar geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan yang mengandung tiga unsur kebangsaan, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.[1]

Dalam mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita cita Bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam Alinea ke 2 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu "terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur". Selanjutnya di dalam alinea ke 4 memuat tujuan nasional yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia"[2].

Saat ini bangsa Indonesia dalam mensejahterakan msyarakat sangat membutuhkan sumber daya manusia unggul yang berkualitas dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang siap menghadapi setiap Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan, nang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta mencapai tujuan nasional serta harus mengembangkan manusia Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas agar tidak tertinggal dari negara lain.

Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang dapat diukur dari kemajuan kualitas pendidikannya. Optimalisasi peran pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah secara berlanjut, namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaran pendidikan di Indonesia yang berdampak pada rendahnya pencapaian standar nasional kualitas SDM.

Kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih rendah, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil studi PISA *(Program for*

International Student Assessment) tahun 2018 yang menunjukkan Indonesia turun dari urutan ke 72 menjadi ke 77, dikarenakan menurunnya SDM dalam hal membaca, matematika dan sains. Menurut Kepala Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan indeks kualitas pendidikan di Indonesia berada di bawah Malaysia dan Thailand. Hal itu disebabkan karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal dan pembangunan bidang pendidikan masih dihadapkan pada permasalahan pemerataan infrastruktur pendidikan dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan antar perkotaan dengan pedesaan serta pendidikan di Pulau Jawa dengan pendidikan di luar Pulau Jawa.

Pengamatan memperkirakan bahwa perkembangan bangsa menunjukan bahwa kejayaan suatu bangsa tidak ditentukan oleh besarnya jumlah pendudukan, luasnya wilayah yang dikuasai, juga tidak oleh besarnya sumber kekayaan alam namun oleh sumber daya manusia. Meningkatnya kesejahteraan suatu bangsa tampaknya sangat tergantung kepada kemampuan pendidikan, hal ini ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia.

PEMBAHASAN

Pada era globalisasi, dunia pendidikan di Indonesia menjadi pembicaraan bukan karena oleh kehebatan pendidikan nasional akan tetapi lebih banyak dikarenakan kesadaran akan ketertinggalan pendidikan di Indonesia. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah gelombang globalisasi dan dirasakan sangat ketertinggalan dalam mutu pendidikan, baik formal maupun informal. Pendidikan memang telah menjadikan penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa.

Pemerataan pendidikan merupakan rumor sensitif yaitu keadilan dalam memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memberikan akses/pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi yakni menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah 80,48 persen, 59,71 persen, dan 62,66 persen. Meski APM pada jenjang SD sudah cukup tinggi, pada jenjang lanjutan (SMP dan SMA) angka yang dicapai masih rendah. Bila angka-angka itu dielaborasi berdasar kategori desa-kota, status sosial-ekonomi (kaya-miskin), dan provinsi (Jawa-luar Jawa), akan ditemukan fakta disparitas yang amat drastis. Fakta disparitas ini juga dijumpai di provinsi-provinsi Jawa-luar Jawa. APM SMA di Yogyakarta 72,19 persen, sementara di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Bangka-Belitung, Riau dan NTT, kurang dari 60 persen. Bahkan di Papua masih di bawah 40 persen. Kenyataan kesenjangan itulah menjadikan pembuktian untuk melakukan ekspansi program pendidikan secara lebih merata.

Kualitas pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan kualitas hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja *(performance test)*. Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan/pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja dilapangan. Jadi mutu pendidikan pada akhirnya dilihat oleh kualitas keluarannya. Padahal hasil pendidikan yang berkualitas hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika

proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadnya hasil belajar yang bermutu. Dan saat ini pun dikarenakan adanya bencana non alam Ujian Nasional ditiadakan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, keputusan ini untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang ada di Indonesia.

Ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan secara memadai, seperti yang di ketahui sebelumya bahwa akses masyarakat di daerah terhadap pendidikan pada umumnya hingga saat ini masih sangat minim. Dalam rangka mencerdaskan bangsa dan memperkokoh sosial budaya bidang pendidikan maka diharapkan pemerintah wajib menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan secara memadai bagi masyarakat di daerah. Keberhasilan suatu pendidikan harus didukung oleh dana/anggaran yang memadai guna menopang segala aktivitas pendidikan secara keseluruhan. Adalah menggembirakan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sudah ditetapkan bahwa negara diminta untuk memprioritaskan anggaran pendidikan setidaknya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara[3]. Namun eksistensi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih memunculkan permasalahan karena masih banyak anak bangsa yang belum mendapatkan pendidikan yang semestinya dan ada juga yang sama sekali belum pernah mencicipi bangku sekolah. Kondisi tersebut juga mengakibatkan kesenjangan antar daerah terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti IPM Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,47 bila dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur sebesar 64,39 dan Papua sebesar 60,06. Pendidikan nasional yang tidak mampu menjangkau seluruh wilayah kedaulatan Indonesia tentu saja tidak akan mampu memberikan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang menjadi hak mereka. Akibat minimnya akses terhadap pendidikan yang mudah, murah, dan berkualitas, maka sebagian besar rakyat Indonesia yang hidup di pelosok-pelosok daerah akan menjadi semakin tersisihkan dari dinamika pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara kualitas pendidikan di Indonesia masih buruk.

Pendidikan Nasional dimaksudkan untuk menjamin terjadinya pemerataan kesempatan pendidikan, kualitas dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam beberapa teori dalam hal pedidikan nasional untuk mengaitkan permasalahan tersebut yakni **Herbison dan Myers** (Panpan Achmad Fadjri, 2000: 36) “pembangunan sumber daya manusia (SDM) berarti perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat”. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai kemampuan nang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. **Todaro & Smith (2003: 404**) menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas berada pada inti makna pembangunan[4].

Adapun yang dapat dilakukan optimalisasi pendidikan nasional dapat meningkatkan sumber daya manusia yakni:

1. Pemerataan pendidikan yakni bidang pendidikan agar terbuka akses kepada ketentuan tentang pendidikan,

mendorong pertumbuhan yang masif melalui banyaknya sekolah dan menyebarluaskan serta mewajibkan sekolah dasar dan sedikit sekolah menengah. Dukungan sosial yang luas muncul demi peningkatan jumlah dalam ketentuan dan gagasan tentang hak untuk memperoleh pendidikan muncul, yang tercantum secara formal dalam Hak Azasi Manusia yang universal itu. Dalam rangka kebijaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan, diperlukan pula keserasian antar daerah. Hal ini harus mendapat perhatian serius, mengingat pemerataan yang diperlukan sekarang bukan hanya pemerataan kesempatan, melainkan juga pemerataan kualitas.

2. Kualitas pendidikan yakni untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pengembangan pendekatan dan strategi pembelajaran. Berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran telah dikenalkan, diuji cobakan dan juga dilatihkan kepada para pendidik. Berbagai inovasi tersebut memang dilakukan untk meningkatkan kualitas proses belajar yang dialami SDM, karena proses belajar yang berkualitas pada akhirnya akan mendorong mutu hasil belajar SDM (siswa). Dengan pendekatan dan strategi pembelajaran yang inovatif diharapkan akan terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan, menstimulasi pengembangan potensi diri.
3. Tersedianya sarana-prasarana pendidikan akan terpenuhi seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan. Dalam mengimplementasikan peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan yang baik dan lengkap sangat mendukung proses belajar mengajar, sehingga mampu menghasilkan SDM yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah sekolah dan meningkatnya kualitas fasilitas pendukung pendidikan. Ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di daerah akan memberikan kesempatan secara adil bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali. Pendidikan akan membuka peluang yang luas kepada setiap warga negara Indonesia dimanapun berada dan dimanapun bertempat tinggal untuk mengembangkan diri dan ikut serta dalam dinamika pembangunan nasional

PENUTUP

Kesimpulan

a. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, berlangsung sepanjang hayat, dan sekaligus merupakan proses pembudayaan. Pemerataan kesempatan pendidikan, kualitas dan efisiensi manajemen pendidikan untk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan
b. Pembangunan sosial budaya bidang pendidikan harus dipandang sebagai sebuah investasi jangka panjang bagi eksistensi dan kemajuan bangsa.

Saran

Pemerintah harus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, dinamis, kreatif, dan produktif serta meningkatkan fasilitas IPTEK dikarena saat ini semua pendidikan sudah menggunakan kelas jarak jauh (*e-learning*).

Endnotes:

1. Modul Bidang Studi Geopolitik Dan Wawasan Nusantara, PPRA LX, Lemhanas RI, Tahun 2020
2. UUD NRI Tahun 1945.
3. Bunyi Pasal 31 ayat (4) bahwa: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan

sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan belanaja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional.

4. Mohamad Mustari, Ph.D. 2014. ”Manajemen Pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Materi Pokok, *“BS Geopolitik dan Wawasan Nusantara”*. Lemhannas RI, 2020.

Modul Bidang Studi Geopolitik Dan Wawasan Nusantara, PPRA LX, Lemhanas RI, Tahun 2020

Mohamad Mustari, Ph.D. 2014. ”Manajemen Pendidikan”. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

TOR Penyusunan Esai, *“BS Geopolitik dan Wawasan Nusantara”*. Lemhannas RI, 2020

Umar Tirtarahardja. Prof. Dr, S.L. La Sulo. Drs, 2015. “Pengantar Pendidikan (Revisi Kedua)”. Jakarta : Rineka Cipta

UUD NRI Tahun 1945.

Bunyi Pasal 31 ayat (4) bahwa: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran dan pendapatan belanaja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional.

MEMPERKUAT HUBUNGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA INDONESIA-NAMIBIA BARU

Dr. Sulthon Sjahril Sabaruddin
Diplomat Ahli Muda (Sekretaris Pertama) dan Kepala Sub Bidang Pengembangan,
Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Email: sulthon.sjahril@kemlu.go.id

Abstraksi

Hubungan diplomatik Indonesia-Namibia terjalin dengan sangat baik dan harmonis dimana di berbagai kesempatan kedua negara menyampaikan solidaritasnya dan saling dukung di berbagai fora organisasi internasional, saling kunjung pejabat tingkat tinggi, namun dalam hubungan kerjasama di bidang ekonomi dinilai masih belum terjalin dengan optimal yang terilustrasikan dari data hubungan *Trade, Tourism,* dan *Investment* (TTI) kedua negara. Beberapa saran upaya untuk meningkatkan mendorong kerjasama ekonomi Indonesia dengan Namibia yaitu: mendorong terealisasinya Indonesia-SACU *Preferential Trade Agreement* (PTA), mendorong promosi ekonomi dan sosial budaya Indonesia yang lebih terfokus, penguatan potensi Indonesianis dan diaspora Indonesia di Namibia, mendirikan *Indonesian Center* di perguruan tinggi Namibia, meningkatkan *people to people contact*, dan meningkatkan kerjasama teknik.

Katakunci: Ekonomi, Sosial Budaya, Indonesia, Namibia Baru

Sumber: www.hidayatullah.com

PENDAHULUAN

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Namibia terjalin dengan sangat baik dan harmonis baik sebelum dan setelah Namibia merdeka pada tahun 1990. Hubungan diplomatik RI-Namibia secara resmi terjalin sejak tahun 1991 dan tak lama kemudian KBRI Windhoek dibuka pada tahun 1992 dengan akreditasi Namibia dan pada tahun 2006, KBRI Windhoek secara resmi juga ditugaskan untuk merangkap Angola. Sedangkan Pemerintah Namibia menempatkan Kedubes Namibia di Kuala Lumpur yang diakreditasikan pula untuk Indonesia. Di bidang politik, Namibia merupakan negara yang bersahabat, stabil, demokratis, aman, damai, memiliki kebebasan media, serta lebih terbuka dan apresiatif terhadap kebudayaan asing. Pemerintah Namibia di berbagai kesempatan selalu menyampaikan penghargaannya atas bantuan dan solidaritas Indonesia pada perjuangan rakyat Namibia baik pada masa sebelum kemerdekaan, pada saat kemerdekaan dan sesudahnya. Pada saat itu, Namibia merupakan koloni terakhir di Afrika dan benteng terakhir dari pertahanan Afrika Selatan diluar wilayahnya sendiri.

Pemerintah Indonesia senantiasa mendukung gerakan pembebasan rakyat Namibia dibawah pimpinan *The South West Africa People's Organisation*[1] (SWAPO) dan pelaksanaan Resolusi DK-PBB Nomor 435/1978 yang diadopsi pada 29 September 1978 mengenai persiapan kemerdekaan Namibia (Adnan, 2008, hal. 83). Selain itu, Indonesia aktif berperan sebagai anggota Dewan Namibia, Komite Dekolonisasi dan membantu tugas-tugas *United Nations Transitional Assistance Group (UNTAG)*, dengan mengirimkan 50 perwira Polri (*Civilian Police*/CIVPOL) dalam mengawasi jalannya pemilu di Namibia (Adnan, 2008, hal. 83). Pada saat kemerdekaan Namibia pada 21 Maret 1990, Presiden RI mengutus Menlu Ali Alatas sebagai utusan khusus untuk menghadiri upacara kemerdekaan Namibia.

Selain itu, hubungan baik kedua negara juga tercermin dari dukungan atau saling dukung di berbagai organisasi internasional dan hingga saat ini, Pemerintah Namibia selalu mendukung NKRI, hal ini terlihat dari tidak adanya pernyataan-pernyataan Pemerintah Namibia mengenai isu disintegrasi di Indonesia. Konstitusi Namibia *Article 96* menjelaskan prinsip politik luar negeri Namibia yang bersifat non-blok (*non-alignment*) dan ditujukan untuk meningkatkan hubungan baik yang saling menguntungkan dalam bekerjasama dengan negara-negara lain serta bertujuan meningkatkan perdamaian, keamanan dan ikut mendorong penyelesaian sengketa internasional secara damai serta menghormati hukum internasional (Mushelenga, 2013). Namibia menganggap penting kerjasama regional *Southern African Development Community* (SADC), *African Union* (AU), *South African Customs Union* (SACU), Persemakmuran/ *Commonwealth*, Gerakan Non-Blok (GNB), serta organisasi internasional seperti PBB.

Hubungan politik RI-Namibia yang telah terpelihara dengan baik ini juga diikuti dengan berbagai upaya kerjasama yang dilakukan kedua negara di berbagai bidang antara lain: saling kunjung pejabat tingkat tinggi[2], diselenggarakannya Sidang Komisi Bersama I RI-Namibia pada tanggal 11-12 Mei 2009 di Jakarta dengan sebanyak 19 (sembilan belas) area kerjasama yang disepakati kedua negara untuk ditingkatkan, serta terdapatnya beberapa kesepakatan yang telah ditandatangani kedua negara (KBRI Windhoek, 2015). Namun dalam hubungan kerjasama di bidang ekonomi harus diakui masih belum terjalin dengan optimal. Hal ini dapat terlihat data hubungan *Trade, Tourism,* dan *Investment* (TTI) kedua negara jauh sejak terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara tahun 1991 silam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, pokok persoalan utama yang akan dibahas dalam makalah ini adalah langkah dan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemri dalam meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi Indonesia di negara Namibia mengingat hubungan ekonomi RI-Namibia hingga saat ini masih dibawah potensinya.

PEMBAHASAN

Namibia memiliki wilayah seluas 824.292 km^2 dan sebagian besar wilayahnya merupakan padang pasir dengan penduduk lebih dari 2,54 juta orang (est. 2020), 10 persen diantaranya berkulit putih dan 50 persen adalah Ovambo (kelompok etnis terbesar di Namibia) yang sebagian besar tinggal di sebelah utara, dekat Angola. Negara Namibia kaya akan uranium, berlian, tembaga, emas, timah, seng besi, perak, lithium, kadmium, minyak bumi, gas alam, garam, vanadium, germanium, batu bara, dan bijih besi. Namibia merdeka tanggal 21 Maret 1990 saat Afrika Selatan mengakui kemerdekaan Namibia dan menjadi negara berdaulat. Dalam perkembangannya, perekonomian Namibia mengalami kemajuan yang cukup pesat. *World Bank* (2019) mengkategorikan Namibia sebagai negara *upper middle-income country* dengan PDB per Kapita (*Current* US$) sebesar US$5931 (2018) dan merupakan ketiga tertinggi di kawasan Selatan Afrika di belakang Botswana (US$8254), Afrika Selatan (US$6374), namun jauh diatas Swaziland (US$4145) dan Lesotho (US$1299). Meskipun demikian, perekonomian Namibia masih amat terikat dengan ekonomi Afrika Selatan, khususnya

ekspor mineral dikarenakan keterbatasan modal, sumber daya manusia (SDM) serta kuatnya pengaruh ekonomi Afrika Selatan. Selain itu, Namibia masih dihadapi dengan permasalahan kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat yang sangat tinggi. Perekonomian Namibia masih sangat bergantung pada sektor primer terutama pertambangan.

Dalam kerjasama hubungan ekonomi RI-Namibia, kedua negara telah memiliki beberapa persetujuan di bidang ekonomi yaitu: Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Namibia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (10 April 1997), Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Namibia mengenai Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (19 Agustus 1997), Nota Kesepahaman antara KADIN RI dan KADIN Namibia (NCCI) mengenai Pembentukan Gugus Tugas di Bidang Kerjasama Perdagangan dan Industri (31 Maret 2000) dan Nota Kesepahaman Bidang Kelauatan dan Perikanan (2018). Sejumlah produk Indonesia yang telah masuk ke pasar Namibia dan Angola[3] antara lain: PT. Indofood Sukses Makmur (Indomie), Fastrata Buana (minuman instan dan biskuit); PT. Universal Indofood Product (biskuit); PT. Tunas Baru Lampung (minyak sawit); PT. Elang Perdana Tyre Industry (Ban Kendaraan); Wings Group (deterjen); PT. Argo Pantes (bahan tekstil); Multi Commodity Internasional (sabun mandi); CV Karya Hidup Sentosa (traktor tangan); dan PT. Bina Karya Prima (minyak sawit).

Namun demikian hubungan ekonomi RI-Namibia dinilai masih belum merefleksikan potensi sebenarnya. Di bidang perdagangan, selama periode 2000-2019 nilai perdagangan bilateral RI-Namibia bersifat fluktuatif namun cenderung dengan tren peningkatan. Pada tahun 2000, nilai perdagangan kedua negara sebesar US$2.28 juta dan pada tahun 2019 nilai perdagangan bilateral meningkat menjadi US$10.55 juta. Hubungan perdagangan kedua negara pernah mencapai puncaknya sebesar US$26.98 juta pada tahun 2009 silam (lihat grafik 1). Namun demikian dalam 5 (lima) tahun terakhir, walaupun hubungan kedua negara mengalami tren peningkatan sebesar 16.2 persen, akan tetapi Indonesia selalu mengalami defisit dagang dengan Namibia.

Komoditas ekspor utama Indonesia antara lain: kertas, sabun, ikan kemasan, furnitur dan ban. Secara rinci, pada tahun 2018, produk ekspor[4] utama Indonesia ke Namibia adalah: *fish, fresh & simply preserved* (SITC031) sebesar US$802120 diikuti *furniture* (SITC821) sebesar US$97132, *fish, in airtight containers, n.e.s & fish preparations* (SITC032) sebesar US$77300, *perfumery, cosmetics, dentifrices, etc* (SITC553) sebesar US$57736, *food preparations, n.e.s.* (SITC099) sebesar US$38220, *articles of rubber, n.e.s* (SITC629) sebesar US$27012, *lime, cement & fabr. Bld. Mat. Ex. Glass/ clay materials* (SITC661) sebesar US$26067, *mineral manufactures, n.e.s* (SITC663) sebesar US$13376, *manufactures of metal, n.e.s* (SITC698) sebesar US$7215, *chocolate & other food preparations cont. cocoa, n.e.s.* (SITC073) sebesar US$4454.

Sedangkan produk yang diimpor oleh Indonesia adalah sebagian besar merupakan komoditi *unwrought zinc* (seng yang tidak ditempa) untuk keperluan industri di Indonesia diikuti komoditas ikan. Secara rinci produk impor Indonesia dari Namibia

adalah *zinc* (SITC686) sebesar US$12.69 juta diikuti dengan *fruit, fresh, and nuts excl. oil nuts* (SITC051) sebesar US$85375, *other electrical machinery and apparatus* (SITC729) sebesar US$30188, *machinery and appliances non-electrical parts* (SITC719) sebesar US$12922, *food preparations, n.e.s.* (SITC099) sebesar US$11768, dan *electric power machinery and switchgear* (SITC722) sebesar US$8738.

Grafik 1: Hubungan Perdagangan RI-Namibia Periode 2000-2019

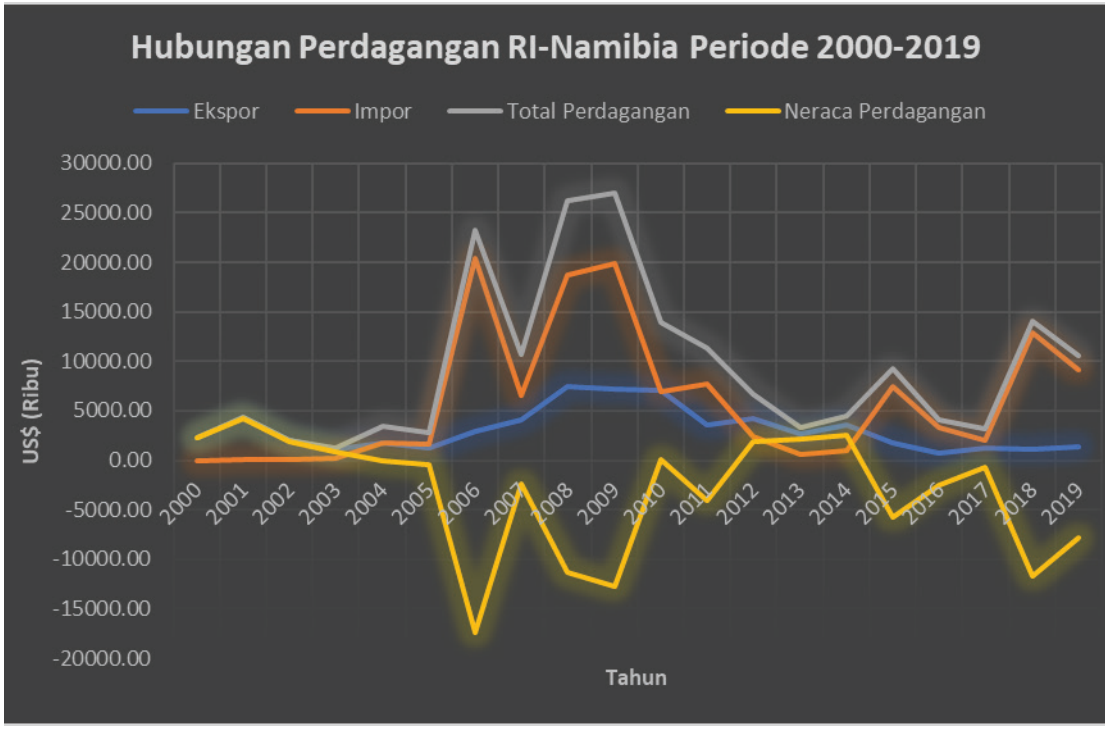

Sumber: *World Integrated Trade Solution* (2020) dan Kementerian Perdagangan RI (2020), Diolah oleh Penulis

Di bidang investasi, selama periode 2010-2019 tercatat terdapat 5 (lima) proyek investasi Namibia di Indonesia sebesar US$2119400 (BKPM, 2020). Sedangkan, investasi Indonesia di Namibia tercatat Pertamina memiliki aset melalui pembelian saham Maurel dan Prom (M&P), perusahaan minyak Perancis yang salah satu ladang operasinya berada di Namibia. Dalam bidang kerja sama teknik, tercatat 16 warga negara Namibia telah mengikuti sejumlah program peningkatan kapasitas selama periode 2006-2014 di beberapa bidang seperti pertanian, perikanan, dan pendidikan diplomatik. Sedangkan di bidang pariwisata, selama periode 2010-2019, jumlah kunjungan wisman dari negara Namibia ke Indonesia meningkat dari 110 orang (tahun 2010) dan pada tahun 2019 sebanyak 588 orang (lihat grafik 2).

Merujuk perkembangan data hubungan ekonomi kedua negara tersebut, tergambarkan bahwa hubungan ekonomi kedua negara masih dibawah potensinya.

Maka dari itu, perlu langkah upaya untuk meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi Indonesia di negara Namibia. Sebagaimana diketahui, diplomasi ekonomi telah mendapatkan perhatian khusus dan bahkan sebagai prioritas pertama dalam prioritas 4+1[5] polugri RI (Natasia, 2019). Selain itu, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya diplomasi ekonomi terutama dalam mendorong kinerja ekspor Indonesia, menarik investasi asing dan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan tujuan akhir menghasilkan devisa negara serta guna menjawab berbagai tantangan perekonomian nasional yang ada saat ini, terutama persoalan defisit perdagangan yang terus terjadi.

Grafik 2: Jumlah Kunjungan Wisman Namibia ke Indonesia Periode 2010-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil gambaran pembahasan diatas terilustrasikan bahwa di bidang politik hubungan kedua negara sangat bersahabat, namun dalam hubungan kerjasama ekonomi masih belum maksimal dan dibawah potensinya, maka dari itu perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Republik Namibia memang merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak (2.54 juta jiwa) namun negara ini memiliki potensi daya beli yang cukup tinggi (perdapatan per kapita US$5931), dukungan infrastruktur yang sangat baik, dan posisi negaranya yang strategis sebagai *hub/gateway* perdagangan yang potensial di kawasan SADC dan SACU yang membuka peluang bagi pengusaha Indonesia untuk melakukan penetrasi pasar regional SADC (15 negara dengan pangsa pasar lebih dari 230 juta jiwa). Selain itu, mengingat keterbatasan yang ada di dalam negeri, perekonomian Namibia memiliki ketergantungan tinggi terhadap barang impor.

Saran

Mengingat cukup besar potensi ekonomi yang dimiliki negara ini, maka kiranya Pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian lebih serta melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi RI-Namibia. Namibia merupakan pasar potensial produk ekspor non-migas Indonesia. Hubungan kedua negara yang telah terjalin hampir tiga dekade sejak 1991 perlu didukung kerja sama yang lebih konkret di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini, dalam upaya meningkatkan diplomasi ekonomi[6] Indonesia di negara Republik Namibia kiranya mungkin dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Mendorong Terealisasinya Indonesia-SACU *Preferential Trade Agreement* (PTA)**

   Pada tanggal 30 Agustus 2018, Presiden Jokowi pernah meminta dukungan Pemerintah Namibia untuk mewujudkan pembentukan RI-SACU PTA dengan harapan terealisasinya kerjasama PTA ini akan membuka akses pasar dengan penurunan tarif produk-produk antara Indonesia dengan negara-negara SACU, sehingga akan terbentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan juga memajukan (Sofia, 2018). Pada kesempatan lain, pada tanggal 6 Desember 2019, dalam Konsultasi Bilateral RI-Afrika Selatan menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan perjanjian RI-SACU PTA (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

   SACU merupakan grup ekonomi sub-kawasan serikat pabean atau organisasi bebas tarif dagang antarnegara anggota yang didirikan pada tahun 1910, beranggotakan Namibia, Lesotho, Eswatini (Swaziland), Botswana, dan Afrika Selatan. Dalam kerangka grup sub-regional, Namibia memiliki nilai strategis sebagai Sekretariat SACU. SACU memiliki potensi pasar sebesar US$541 milyar dengan jumlah populasi mencapai lebih dari 51 juta jiwa dan PDB per Kapita sebesar US$10605.

   Di wilayah akreditasi KBRI Windhoek dapat dilakukan serangkaian upaya lobi serta diskusi dalam mendorong pembahasan RI-SACU PTA dengan tujuan mewujudkan proses dimulainya negosiasi pembentukan RI-SACU PTA antara lain di Sekretariat SACU yang bermarkas di Windhoek, beberapa perguruan tinggi setempat (antara lain *University of Namibia*, *International University of Management*, dan *Namibian University of Science and Technology*), *think tanks*, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Mengingat sebagian besar negara anggota SACU berada di wilayah akreditasi KBRI Pretoria didukung KJRI Cape Town, maka upaya serupa perlu dilakukan oleh KBRI Pretoria bersama KJRI Cape Town.

2. **Mendorong Promosi Ekonomi dan Sosial Budaya Indonesia yang lebih Terfokus**

   Upaya promosi ekonomi hendaknya dilakukan dengan lebih terfokus terutama dalam pemilahan produk potensial Indonesia (a.l. beberapa produk potensial yakni produk herbal/jamu, produk obat-obatan, produk makanan dan minuman, produk mebel, tekstil, dan alas kaki), produk industri strategis (PT Industri Kereta Api (Persero)/PT INKA (Persero) dan

PT. PINDAD (Persero)), dan produk jasa (a.l. jasa pemijatan, salon/cukur rambut, perhotelan, dan restoran/kuliner). Promosi ekonomi tidak hanya berpartisipasi pada pameran dagang (*trade fair*) namun perlu dilakukan personal atau *door to door marketing*. Namun upaya promosi ekonomi melalui misi dagang dan forum bisnis kiranya tetap terus digalakkan.

Upaya meningkatkan *awareness* melalui serangkaian promosi (*roadshow*) tentang Indonesia terus digalakkan dengan target antara lain di *Namibian Business School* (*University of Namibia*/UNAM), *Harold Pupkewitz Graduate School of Business* (*Namibian University of Science and Technology*/NUST), *School of Postgraduate Studies International University of Management* (IUM), berbagai sekolah internasional dan lokal, KADIN, dan *think-tanks* (a.l. *Institute for Public Policy Research (IPPR), Labour Resource and Research Institute (LARRI))*.

Titik fokus promosi ekonomi dan sosial budaya tidak lagi pada promosi wisata dan budaya semata, akan tetapi perlu pula untuk lebih menekankan pada serangkaian partisipasi promosi pendidikan tinggi (*education fair*), pengenalan seni bela diri pencak silat (*martial arts*), dan pameran buku (*book fair*). Di dunia pendidikan, Pemri perlu gencar untuk mendorong para pelajar Namibia untuk menempuh studi di Indonesia dengan biaya sendiri (atau skema beasiswa parsial) "*to make Indonesia as a preferred education destination in Southeast Asia*". Sebagai gambaran, pelajar Namibia yang menempuh studi di Malaysia sebanyak lebih dari 150 orang dengan skema *the Namibian Students Financial Assistance Fund* (NSFAF) yang mencakup N$4000 *stipend* per bulan, serta *tuition fees*, buku, dan akomodasi yang dibayarkan per tahun (Linekela, 2014). Sejak didirikannya pada tahun 1997, NSFAF telah menyediakan anggaran dalam bentuk *grants* dan *loans* kepada 1300 pelajar Namibia yang menempuh studi di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Namibia memiliki kebutuhan dan minat yang tinggi untuk membangun kapasitas SDM dan membuka peluang bagi Indonesia dalam peningkatan kerja sama khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan.

3. Penguatan Potensi Indonesianis dan Disapora Indonesia di Namibia

Walaupun jumlah dan kekuatan diaspora Indonesia[7] dan Indonesianis di Namibia masih sangat kecil dan terbatas, namun perlu ditumbuhkan antara lain dengan mengajak para Indonesianis dan diaspora Indonesia di Namibia melakukan serangkaian upaya dan kegiatan seperti membuka beberapa usaha skala kecil-menengah seperti restoran khas Indonesia, bisnis toko herbal, jamu dan pijat tradisional, usaha cukur rambut/salon, warung produk Indonesia di salah satu mal di kota Windhoek, Namibia. Selain itu, para Indonesianis dan diaspora Indonesia dapat diajak untuk menyusun buku hubungan RI-Namibia (buku bunga rampai) yang mungkin dapat dipublikasikan KBRI Windhoek dan/atau bersama UNAM Press atau penerbit setempat lainnya, serta diberikan dukungan *capacity building* seperti *doing business Indonesia-*

Namibia dalam upaya untuk mendukung hubungan ekonomi dan sosial budaya RI-Namibia dan dapat termasuk dengan memanfaatkan perangkat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) dalam *platform digital dialogue*, *e-learning* atau *e-training*.

4. Mendirikan *Indonesian Center* di Perguruan Tinggi Namibia

Mendirikan *Indonesian Center* dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) KBRI Windhoek dengan salah satu kampus di Namibia. Sebagai gambaran, di IUM sejak tahun 2018 lalu terdapat *Russian Namibian Cultural and Educational Center* (RusNam) dan di UNAM telah didirikan *Confucius Institute* untuk pengajaran bahasa mandarin tingkat dasar sejak tahun 2013. Kami menilai pendirian *Indonesian Center* di *International University of Management* merupakan salah satu kampus potensial sebagai wadah antara lain untuk promosi budaya dan ekonomi, seminar/ konferensi, pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), desain kurikulum dan *business case study (doing business in Indonesia)* serta *joint research* tentang Indonesia.

5. Meningkatkan *People to People Contact*

Dalam upaya mendorong *people to people contact*, beberapa aspek yang mungkin dapat dilakukan dan dikembangkan antara lain: menjajaki kerjasama *code sharing* Garuda Indonesia – Air Namibia, MoU/Nota Kesepahaman mengenai bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas RI-Namibia, pertukaran dan dialog antar para pemuda pelajar dan akademisi (termasuk *digital dialogue)*, program *familiarization trip* (famtrip), penjajakan kerjasama *brother/sister city* serta mendorong terealisasi *pending matters* seperti merealisasikan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-2 RI-Namibia yang tertunda sejak tahun 2011 lalu. Selain itu, pengangkatan Sdr. Yaya W. Junardy sebagai Konsul Kehormatan Namibia untuk Indonesia berkedudukan di Jakarta sejak tahun 2014 lalu dapat menjadi faktor pendukung lain yang perlu diperhitungkan dalam melihat prospek perdagangan kedua negara.

6. Meningkatkan Kerjasama Teknik

Dalam kerjasama teknik, Indonesia telah menawarkan sejumlah program peningkatan kapasitas kepada warga Namibia di beberapa bidang seperti pertanian, perikanan, dan pendidikan diplomatik. Kerjasama teknik antar negara berkembang ini perlu didorong terus dan kini dapat pula melalui *Indonesian Agency for International Development* (IndoAid). Terdapat banyak peluang yang dapat dikontribusikan oleh Indonesia terhadap Namibia seperti pada sektor pertanian (keamanan dan teknologi pangan), pendidikan dan pelatihan kejuruan, kepemudaan, pembangunan pedesaan, dan usaha kecil menengah.

Selain itu, dapat didorong pula *sharing best practices* dan melakukan riset bersama a.l. di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Sebagai contoh, *Deserta Fruit Namibia* memiliki pengalaman cukup sukses dalam perkebunan kurma dan disisi lain perkebunan kurma (*dates*) di Indonesia

belum secara optimal dibudidayakan, maka dalam kaitan ini dapat dilakukan *sharing best practices* serta melakukan riset bersama. Selain itu, di bidang perikanan, Pemerintah Indonesia dapat melakukan *sharing best practices* dalam budidaya pengelolaan ikan tawar kepada warga Namibia yang bergerak di bidang budidaya perikanan air tawar.

Endnotes:

1. SWAPO yang didirikan pada tahun 1960 ini merupakan organisasi dan kumpulan militan yang menentang tindakan Afrika Selatan, melawan sistem kolonial secara keseluruhan dan gerakan agar Namibia mendapat kemerdekaan dari pemerintahan Afrika Selatan. Perjuangan Namibia dilakukan melalui dua jalur yakni perlawanan melalui perjuangan bersenjata dan perlawanan melalui diplomasi. Pada tahun 1978, PBB mengakui SWAPO sebagai satu-satunya wakil rakyat dari Namibia dan pada tahun yang sama GNB menerima SWAPO sebagai anggota GNB.
2. Presiden Sam Nujoma berkunjung ke Indonesia pada September 1992, Agustus 1997, Juli 2002, dan Presiden Geingob pada Agustus 2018 dan selaku Perdana Menteri pada Oktober 2000. Sedangkan Presiden Soeharto berkunjung ke Namibia pada November 2007.
3. KBRI Windhoek diakreditasikan untuk negara Namibia dan Angola.
4. Data perdagangan menggunakan SITC revisi 1 dari *World Integrated Trade Solution* (WITS).
5. Prioritas 4+1 mencakup yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta infrastruktur diplomasi yang kuat.
6. Mendorong kerjasama ekonomi perlu ditopang dengan kerjasama sosial-budaya.
7. Per Februari 2020 tercatat jumlah WNI bermukim di Namibia sebanyak 107 orang, KBRI Windhoek (2020).

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, A.H. (2008), "Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika", *CVAngkasa,* Edisi Pertama, Bandung, hal 79-84.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020), "Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Tahun 1990 s/d 2020", *National Single Window for Investment*. Dapat diunduh pada situs: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Badan Pusat Statistik (2020), "Data Tahunan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Berkebangsaan Namibia Periode 2010-2019", *Subdirektorat Statistik Pariwisata,* Jakarta.

KBRI Windhoek (2015), "Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 KBRI Windhoek", *Situs KBRI Windhoek,* 13 Mei. Dapat diunduh pada situs: https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9SZW5zdHJhJTIwMjAxNSUyMC0lMjAyMDE5JTIwS0JSSSUyMFdpbmRob2VrLnBkZg==

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2019), "Konsultasi Bilateral RI-Afrika Selatan Perdana Dorong Penguatan Kerja Sama Konkrit", *Situs Kementerian Luar Negeri RI*, 6 Desember. Dapat diunduh pada situs: https://kemlu.go.id/portal/id/read/880/berita/konsultasi-bilateral-ri-afrika-selatan-perdana-dorong-penguatan-kerja-sama-konkrit

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2020), "Neraca Perdagangan Indonesia dengan Namibia Periode 2015-2020", *Portal Statistik Perdagangan*. Dapat diunduh pada situs: http://statistik.kemendag.go.id/balance-of-trade-with-trade-partner-country

Linekela, H. (2014), "Namibian Students Face Starvation in Malaysia", *The Villager Newspaper,* 8 September. Dapat diunduh pada situs: https://www.thevillager.com.na/articles/7232/namibian-students-face-starvation-in-malaysia/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id

Mushelenga, P. (2014) "Principles and Principals of Namibia's Foreign Relations", dalam Namibia's Foreign Relations: Historic Contexts, Current Dimensions, and Perspectives for the 21st Century, diedit oleh Anton Bösl, André du Pisani, and Dennis U Zaire, hal. 59–80, Windhoek: Macmillan Education Namibia.

Natasia, C.W. (2019), "Menlu Sampaikan "4 Plus 1" Prioritas Politik Luar Negeri RI", *BeritaSatu.com,* 29 Oktober. Dapat diunduh pada situs: https://www.beritasatu.com/politik/582517-menlu-sampaikan-4-plus-1-prioritas-politik-luar-negeri-ri

Soeratman, D. (2012). "Sejarah Afrika", Yogyakarta: Ombak.

Sofia, H. (2018), "Presiden Jokowi minta dukungan Namibia wujudkan perdagangan bebas RI-SACU", *Antaranews Babel*, 30 Agustus. Dapat diunduh pada situs: https://babel.antaranews.com/berita/84185/presiden-jokowi-minta-dukungan-namibia-wujudkan-perdagangan-bebas-ri-sacu

World Bank (2019), "GDP per capita (current US$)", *Databank*. Dapat diunduh pada situs: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

World Integrated Trade Solution (2020). Available from: http://wits.worldbank.org/

BIRO HUMAS SETTAMA LEMHANNAS RI
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110
Telp/Fax. 021-3451926, Website: www.lemhannas.go.id

ISSN 2252-8555